

**DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN
DAN PERIKANAN**



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS

KABUPATEN JEMBER 2025–2029

**TAHUN
2025– 2029**





DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
BAB I PENDAHULUAN	iv
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan	8
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	12
2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan	12
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	12
2.1.2 Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	22
2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	27
2.1.4 Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	39
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan pangan, Peternakan dan Perikanan	41
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	46
2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis	75
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN ..	77
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	77
3.2 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	82



**BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA
PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN 87**

- 4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan..... 87
- 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan 129
- 4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah 184
- 4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)..185

BAB V PENUTUP 188



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025
Tabel 2.2	Proporsi Pegawai Berdasarkan Jabatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025.....
Tabel 2.3	Jumlah Aset yang dimiliki dan jumlah aset yang tidak dipakai
Tabel 2.4	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember (T-C.23)
Tabel 2.5	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember (T-C.24)
Tabel 2.6	Tabel Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
Tabel 2.7	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
Tabel 2.8	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran K/L
Tabel 2.9	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Berdasarkan Sasaran Provinsi Jawa Timur
Tabel 2.10	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember ditinjau dari Implikasi RTRW
Tabel 2.11	Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember ditinjau dari Implikasi KLHS
Tabel 2.12	Teknik Menyimpulkan Isu Strategis



Tabel 3.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Tabel 3.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan (T-C.26)
Tabel 4.2	Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Subkegiatan..
Tabel 4.3	Rencana Program, Kegiatan, Subkegiatan dan Pendanaan Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program
Tabel 4.4	Prioritas Pembangunan Daerah
Tabel 4.5	Indikator Kinerja Utama (IKU)
Tabel 4.6	Indikator Kinerja Kunci (IKK)



DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029
Gambar 4.2	Misi Pembangunan Jangka Menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029
Gambar 2.1	Cashcading Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272 ayat (1) dan ayat (2), disebutkan bahwa Perangkat Daerah Menyusun Rencana Startegis dengan berpedoman pada RPJMD. Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah



sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, bidang pertanian khususnya sub sektor peternakan dan bidang kelautan dan perikanan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Adanya



pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan harus menyesuaikan nomenklatur indikator subkegiatan selaras dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021. tersebut memerlukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan indikator subkegiatan berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);
8. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia



Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);



16. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan



Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur
Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

23. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 123);
24. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;



30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;



4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.



1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 2.1 Subbab Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember paling sedikit memuat:
 - 2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember;
 - 2.1.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember;
 - 2.1.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
 - 2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan
- 2.2 Subbab Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember paling sedikit memuat:
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember dan
 - 2.2.2 Isu Strategis

BAB III. TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN



Pada bab ini memuat.

- 3.1 Tujuan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember,
- 3.2 Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
- 3.3 Strategi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember
- 3.4 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember

BAB IV. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini memuat.

- 4.1 Uraian Program;
- 4.2 Uraian Kegiatan;
- 4.3 Uraian Sub Kegiatan beserta Kinerja, Indikator, Target, dan Pagu Indikatif;
- 4.4 Uraian Sub Kegiatan dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah;
- 4.5 Target keberhasilan Pencapaian Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember melalui Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah; dan
- 4.6 Target Kinerja Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Tahun 2025-2029 melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V. PENUTUP

Bab ini memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah.



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Maka Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, bidang pertanian khususnya sub sektor peternakan dan bidang kelautan dan perikanan.

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 11 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember maka tugas, fungsi dan struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember dapat dijelaskan sebagai berikut:

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Dinas Ketahanan Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, bidang pertanian khususnya sub sektor peternakan dan bidang kelautan dan perikanan.

1. Sekretariat

Sekretariat sebagaimana dimaksud mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengkoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian,



perencanaan pelaporan dan keuangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud Sekretariat mempunyai fungsi:

- 1) Penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan dan Keuangan di lingkungan dinas;
- 2) Pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- 3) Pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan Keuangan di Lingkungan Dinas;
- 4) Pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- 5) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas.

2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas sebagai berikut:

- 1) Menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
- 2) Menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
- 3) Menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan



kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;

- 4) Menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
- 5) Menyiapkan dan mengkoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
- 6) Menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
- 7) Melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan kantor;
- 8) Melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan asset/barang milik daerah;
- 9) Melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
- 10) Menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 11) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh sekretaris.

3. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan

Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi meliputi:



- 1) Penyusunan rencana peningkatan produksi Perikanan Tangkap;
- 2) Pengumpulan data dan sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan produksi perikanan tangkap;
- 3) Pelaksanaan penyiapan pemberdayaan nelayan kecil;
- 4) Penyusunan kebijakan penyebaran informasi teknologi produksi Perikanan Tangkap;
- 5) Penyusunan kebijakan fasilitasi penyediaan Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
- 6) Penyusunan kebijakan, pengelolaan dan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI);
- 7) Penyusunan Kebijakan Peningkatan Kelas Kelompok Usaha Bersama (KUB);
- 8) Penyediaan Data dan Sasaran kebijakan dalam upaya peningkatan Sumberdaya Perikanan di Perairan Umum Daratan;
- 9) Pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pengendalian Sumberdaya Perikanan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- 10) Pelaksanaan pembinaan penyiapan dan pemberdayaan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas);
- 11) Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban atas Pela
- 12) Pelaksanaan Tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas

4. **Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen**

Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta



pelaporan capaian Indikator Kinerja Bidang Perikanan Budidaya dan Pasca Panen serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Bidang Perikanan Tangkap dan Sumberdaya Perikanan mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Pelaksanaan Penyiapan pembudidaya ikan kecil;
- 2) Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi izin usaha di Bidang pembudidayaan Ikan yang usahanya, lokasi, dan/atau manfaat atau dampak negatifnya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten yang menggunakan Teknologi Sederhana, semi Intensif, dan Intensif, serta Tidak Menggunakan Modal Asing;
- 3) Pelaksanaan penetapan persyaratan dan prosedur, pelayanan penerbitan rekomendasi perizinan berusaha skala mikro dan kecil bagi pembudi daya ikan kecil dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- 4) Pelaksanaan penyiapan rekomendasi penerbitan tanda pencatatan usaha pembudidayaan ikan (TPUPI)
- 5) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan budidaya ikan;
- 6) Penyusunan kebijakan penyebaran informasi pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
- 7) Monitoring dan pengendalian pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya perikanan;
- 8) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kegiatan perbenihan dan calon induk unggul;
- 9) Penyusunan rencana peningkatan kelas kelompok pembudidaya ikan (POKDAKAN);



- 10) Perencanaan, pengembangan, pemanfaatan dan perlindungan lahan untuk pembudidayaan ikan di darat;
- 11) Perencanaan, dan pengembangan pemanfaatam air untuk pembudidayaan ikan di darat;
- 12) Penyediaan data dan informasi usaha pemasaran dan pengolahan hasil perikanan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- 13) Fasilitasi peningkatan ketersediaan ikan untuk konsumsi dan usaha pengolahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten;
- 14) Pembinaan mutu dan keamanan hasil perikanan, penyusunan rencana peningkatan produksi bagi usaha pengolahan dan pemasaran Skala Mikro dan Kecil;
- 15) Penyusunan kebijakan peningkatan kelas kelompok pengolah dan pemasar (POKLAHSAR)
- 16) Pengembangan dan fasilitasi sarana dan prasarana kelompok pengolah dan pemasar serta UMKM Produk Perikanan;
- 17) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas termasuk capaian indicator kinerja bidang; dan
- 18) Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

5. Bidang Peternakan

Bidang Peternakan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang peternakan dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Peternakan, mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang benih/bibit, produksi, peternakan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- 2) Pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- 3) Pengendalian peredaran dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/bibit hijauan pakan ternak;
- 4) Pengelolaan pengawasan mutu dan peredaran bibit ternak dan pengawasan mutu pakan ternak;
- 5) Pengelolaan pengendalian penyediaan dan peredaran bibit ternak dan pakan ternak;
- 6) Pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- 7) Pemberian rekomendasi di bidang peternakan;
- 8) Pemberian bimbingan pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- 9) Pemantauan dan evaluasi di bidang peternakan;
- 10) Pengelolaan wilayah/kawasan sumber bibit ternak;
- 11) Pengelolaan pengembangan lahan penggembalaan umum;
- 12) Penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- 13) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

6. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet

Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan di bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet dan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Kesehatan Hewan dan Kesmavet, mempunyai fungsi:

- 1) Penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesehatan hewan dan kesmavet;
- 2) Pengendalian penyakit hewan dan penjaminan kesehatan hewan;
- 3) Pengawasan obat hewan;
- 4) Pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- 5) Pengelolaan pelayanan jasa medik veteriner;
- 6) Penerapan dan pengawasan persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- 7) Pemberian rekomendasi di bidang kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- 8) Pemantauan dan evaluasi di bidang kesehatan hewan;
- 9) Pengawasan, pengamatan dan epidemiologi penyakit hewan serta membuat peta penyakit hewan;
- 10) Pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit hewan;
- 11) Pelaksanaan pelayanan kesehatan hewan;



- 12) Pelaksanaan pengawasan kesehatan masyarakat veteriner;
- 13) Pelaksanaan pengembangan teknologi kesehatan hewan;
- 14) Pelaksanaan surveillans penyakit hewan;
- 15) Penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas; dan
- 16) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 119 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Bidang Ketahanan Pangan mempunyai fungsi meliputi:

- 1) Penyusunan rencana program dan kegiatan di bidang Ketahanan Pangan;
- 2) Pelaksanaan program dan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 3) Pelaksanaan koordinasi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 4) Penyiapan bahan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;



- 5) Penyediaan data informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan pasar;
- 6) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang ketahanan pangan meliputi ketersediaan, penanganan kerawanan, distribusi, cadangan pangan, konsumsi, penganeekaragaman konsumsi pangan dan keamanan pangan;
- 7) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan;
- 8) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan;
- 9) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 10) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 11) pemberian registrasi Pangan Segar Asal Tumbuhan Produksi Dalam Negeri Usaha Mikro dan Kecil (PSAT PDUK);
- 12) pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang ketahanan pangan;
- 13) penyusunan laporan pertanggungjawaban dan pelaksanaan tugas; dan
- 14) pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

8. **UPTD**

Unit Pelaksana Teknis (UPTD) mempunyai tugas:



- 1) UPTD mempunyai tugas membantu pelaksanaan sebagian tugas dinas
- 2) UPTD dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- 3) UPTD merupakan klasifikasi B.
- 4) Jumlah, Nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan fungsi UPTD diatur dengan peraturan Bupati.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas:

- 1) Kelompok jabatan fungsional memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
- 2) Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud terdiri atas berbagai jenis Jabatan Fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan yang pengangkatannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 3) Jumlah kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan yang didasari atas analisis jabatan dan beban kerja
- 4) Tugas, jenis dan jenjang kelompok jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur jabatan fungsional masing-masing.

2.1.2 Sumber daya Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Sumber Daya Manusia merupakan salah satu instrument penunjang pokok pelaksanaan tugas pokok dan fungsi instansi dengan kuantitas dan kualitas yang memadai sesuai analisa

jabatan dan kompetensi. Aparatur Sipil Negara merupakan sumber daya manusia yang mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, dengan kata lain Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang cukup dominan dalam menentukan keberhasilan pelaksanaan pembangunan dan pemerintahan. Oleh sebab itu Aparatur Sipil Negara dituntut untuk mampu memanfaatkan dana, daya, sarana dan prasarana yang telah ditetapkan untuk mencapai hasil yang optimal. Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan sesuai struktur organisasi terdiri dari 89 (Delapan Puluh Sembilan) orang PNS, 18 (Delapan Belas) Orang PPPK dan Non ASN sebanyak 100 Orang. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember sebanyak 207 Orang.

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1.	Eselon II/b	2
2.	Eselon III/a	2
3.	Eselon III/b	4
4.	Eselon IV/a	6
	JUMLAH	14

Dari data diatas dapat disampaikan bahwa di Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember terdapat 2 (dua) Eselon II, 6 (enam) Eselon III, 6 (enam) Eselon IV, 50 (Lima Puluh) Pejabat Fungsional, 43 (Empat Puluh Tiga) Staf/Non Eselon dan 100 (seratus) Non ASN.

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025 Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	Golongan IV/c	1	-	1



No	Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
2.	Golongan IV/b	2	-	2
3.	Golongan IV/a	3	2	5
4.	Golongan III/d	9	3	12
5.	Golongan III/c	3	2	5
6.	Golongan III/b	3	4	7
7.	Golongan III/a	18	17	35
8.	Golongan II/d	10	-	10
9.	Golongan II/c	6	-	6
10.	Golongan II/b	2	-	2
11.	Golongan II/a	1	-	1
12.	Golongan I/d	-	-	-
13.	Golongan I/c	-	-	-
14.	Golongan I/b	-	-	-
15.	Golongan I/a	-	-	-
16.	PPPK /IX	6	2	9
17.	PPPK / X	3	-	3
18.	PPPK / VII	3	-	4
19.	PPPK / V	7	-	7
20.	PPPK / I	1	-	1



No	Gol/Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
21.	Non ASN (PPPK Paruh Waktu)	91	9	100
	Jumlah	108	29	137

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terdiri dari: 1 (satu) orang Golongan IV/c, 2 (dua) orang Golongan IV/b, 5 (lima) orang Golongan IV/a, 12 (dua belas) orang Golongan III/d, 5 (lima) orang Golongan III/c, 7 (tujuh) orang Golongan III/b, 35 (tiga puluh lima) orang Golongan III/a, 10 (sepuluh) orang Golongan II/d, 6 (enam) orang Golongan II/c, 2 (dua) orang Golongan II/b, 1 (satu) orang golongan II/a, 1 (satu) orang Golongan I/c, 9 (sembilan) orang PPPK/IX, 3 (tiga) orang PPPK/X, 4 (empat) orang PPPK/VIII, 7 Orang PPPK/V dan terdiri dari 100 (Seratus) orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Tabel 2.3

Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025 Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Sarjana S-2	9	1	10
2.	Sarjana S-1	27	27	54
3.	Sarjana S-1 Profesi	9	10	19
4.	Diploma -3	13	1	23
5.	SLTA	90	1	91
6.	SLTP	4		4
7.	SD	15	-	15
	Jumlah	167	40	207



Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan terdiri dari: 10 (Sepuluh) Orang Lulusan Magister S-2, 54 (Lima Puluh Empat) Orang Lulusan Sarjana S-1, 19 (sembilan belas) orang lulusan S-1 Profesi, 23 (Dua Puluh Tiga) orang lulusan Diploma III, 91 (Sembilan Puluh Satu) orang lulusan SLTA, 4 (Empat) orang lulusan SLTP dan 15 (Lima Belas) Orang Lulusan SD.

Dalam Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi lingkup Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasarana perkantoran yang menunjang terhadap upaya pencapaian sasaran. Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Bidang Perikanan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No.	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket.
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1	Tanah	4	3.075.281.640	Baik			
2	Peralatan dan Mesin	466	2.741.173.150	Baik			
3	Peralatan dan Mesin	196	1.271.787.950	Kurang Baik			
4	Peralatan dan Mesin				41	326.316.925	Rusak
5	Gedung dan Bangunan	40	19.247.720.850	Baik			
6	Jalan Irigasi dan Jaringan	19	2.444.546.029	Baik			

Jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Bidang Ketahanan Pangan dan Peternakan adalah sebagai berikut:

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (Rp)		Ket	Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (Rp)		Ket
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
1.	Tanah	16	7.325.865.000,00		-	-	
2.	Peralatan dan Mesin	1.012	7.334.073.444,00		-	-	
3.	Gedung dan Bangunan	65	18.910.319.341,13		-	-	
4.	Jalan Irigasi dan Jaringan	11	1.796.955.000,00		-	-	
5.	Aset Tetap lainnya	59	671.800.800,00		-	-	
6.	Konstruksi dlm Pengerjaan	0	0		-	-	
7.	Aset Lainnya	5.730	4.237.059.080,00		-	-	

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp.69.056.582.284,13 (Enam puluh Sembilan milyar lima puluh enam juta lima ratus delapan puluh dua ribu dua ratus delapan puluh empat koma tiga belas rupiah)

Dalam rangka mendukung pengembangan peran dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember maka peningkatan sarana dan prasarana menjadi sebuah kebutuhan yang cukup besar. Aspek-aspek peningkatan sarana dan prasarana adalah menyangkut pemeliharaan, modernisasi sarana dan prasarana yang ada, serta pembangunan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan.

2.1.3 Kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Dalam merencanakan Tujuan dan Sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan untuk penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029, sangat penting untuk melakukan pengukuran terhadap capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan pada tahun sebelumnya. Pengukuran yang dilakukan terhadap capaian kinerja Tujuan, Sasaran, Program Dan Kegiatan pada tahun sebelumnya akan didapatkan rumusan potensi dan permasalahan yang dapat digunakan dan dipertimbangkan dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Tahun 2025-2029. Pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan untuk periode Renstra tahun sebelumnya dijelaskan pada Tabel 2.4 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember (T-C 23) dibawah ini:



Tabel 2.5 Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kab. Jember (T-C.23.)

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke- (Persentase)		
					2022	2023	2024	2022	2023	2024	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(5)	(7)	(8)	(10)	(11)	(12)	(14)	(15)	(16)
1.	Meningkatnya Ketersediaan Pangan			Skor PPH Ketersediaan	90,8	90,53	90,99	90,7	95,6	91,5	99,9%	100,6%	100,56%
				Skor PPH Konsumsi	91,9	93,56	94	97,7	92,7	92,5	106,3%	99,03%	98,40%
2.	Meningkatnya Produksi Hasil Ternak		Persentase Peningkatan Produksi Komoditas Peternakan	Jumlah Produksi Hasil Ternak Pertahun (Ton)									
				Produksi daging sapi	1.973	2.003	2.033	1.858	2.011,25	2.289	94,2%	100,4%	112,59%
				Produksi daging babi	10	10	10	12,3	14,479	10	123,0%	144,7%	100,00%
				Produksi daging kambing	225	259	263	235,75	303,939	273	104,8%	117,3%	103,80%
				Produksi daging domba	482	490	497	425,6	553,628	534	88,3%	112,9%	107,44%
				Produksi daging unggas	27.185	27.593	28.006	26.751,60	27.723,91	31520	98,4%	101,09%	112,55%
				Produksi telur	15.393	15.629	15.858	14.974,8	15.723,91	18462	97,3%	100,61%	116,42%
				Produksi susu	3.057	3.103	928	3.002,2	839	961	98,2%	27,03%	103,56%
3.	Meningkatnya Produksi Perikanan		Produksi Perikanan Tangkap	Persentase Peningkatan Tangkap	10.200 Ton	10.363 Ton	10.359 Ton	13.591 Ton	13.795 Ton	14.021 Ton	1,4%	1,5%	1,6%
			Produksi Perikanan Budidaya	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	14.797 Ton	15.093 Ton	15395 Ton	15.250 Ton	15.479 Ton	15.787 Ton	1,4%	1,5%	2%
4.	Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan			Persentase Produk Olahan Perikanan yang Bersertifikat	80%	84%	88%	60%	69%	87%	60%	69%	87%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan selama periode Renstra 2021-2026 telah mencapai target yang ditetapkan. Perbandingan capaian kinerja sasaran Tahun 2024 dengan tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

Sasaran Strategis 1: Meningkatnya Ketersediaan Pangan

Dalam hal ketersediaan pangan, target untuk Skor PPH Ketersediaan dan Skor PPH Konsumsi telah tercapai dengan baik. Pada tahun 2022, Skor PPH Ketersediaan tercatat mencapai 99,9%, sementara Skor PPH Konsumsi juga tercapai dengan rasio 106,3%. Hal ini menunjukkan bahwa target yang ditetapkan untuk ketersediaan dan konsumsi pangan tercapai lebih dari yang diharapkan. Keberhasilan ini dapat dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti peningkatan distribusi pangan yang lebih merata, keberlanjutan pasokan pangan, serta kebijakan yang mendukung pemenuhan konsumsi pangan yang berkualitas. Namun, untuk tahun 2023 dan 2024, meskipun masih tercapai, ada sedikit penurunan pada ketersediaan pangan dengan Skor PPH Konsumsi yang mencapai 99,03% pada 2023 dan 98,4% pada 2024, yang menunjukkan adanya potensi penurunan dalam kestabilan pasokan pangan yang perlu diwaspadai.

Sasaran Strategis 2: Meningkatnya Produksi Hasil Ternak

Dalam sektor produksi hasil ternak, sebagian besar target telah tercapai dengan baik. Sebagai contoh, pada tahun 2022, target produksi daging sapi tercapai 94,2%, namun pada tahun 2023 dan 2024, target tercapai lebih dari 100%, dengan rasio 100,4% pada 2023 dan 112,59% pada 2024. Produksi daging babi, kambing, domba, dan unggas juga menunjukkan hasil yang menggembirakan dengan capaian melebihi target yang ditetapkan. Sebagai contoh, produksi daging babi pada tahun 2023 mencapai 144,7% dari target, dan produksi daging kambing tercatat 117,3% pada tahun 2023. Hal ini mencerminkan pencapaian yang sangat baik, didorong oleh keberhasilan dalam pengelolaan sumber daya ternak, pemberdayaan peternak lokal, serta dukungan terhadap kebijakan yang memadai. Namun, produksi daging domba pada tahun 2022 hanya tercapai 88,3%, yang menunjukkan adanya kekurangan dalam pencapaian produksi pada sektor ini. Faktor yang dapat mempengaruhi ketidaktercapaiannya target produksi daging domba di antaranya adalah keterbatasan sumber daya, masalah kesehatan ternak,



serta fluktuasi dalam pasokan pakan yang mempengaruhi produktivitas.

Produksi Telur dan Susu

Meskipun pada sektor produksi telur dan susu targetnya tercapai dengan baik, terdapat beberapa tantangan yang perlu dicermati. Produksi telur pada tahun 2023 tercatat 100,61% dan pada 2024 116,42%, sementara produksi susu mengalami penurunan tajam pada tahun 2023, hanya tercapai 27,03%, meskipun pada tahun 2024, target tercapai 103,56%. Penurunan drastis pada tahun 2023 dapat dipengaruhi oleh masalah di sektor peternakan, seperti kualitas pakan, penyebaran penyakit pada ternak, atau kurangnya dukungan pada sistem distribusi dan pengelolaan ternak sapi perah. Faktor lain yang mungkin berkontribusi adalah fluktuasi harga pakan yang mempengaruhi keberlanjutan produksi susu.

Terdapat beberapa kesenjangan pelayanan yang terlihat dalam capaian kinerja ini. Di sektor produksi susu, misalnya, terjadi penurunan yang signifikan pada tahun 2023 yang menunjukkan adanya gap antara target dan realisasi, yang mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor eksternal dan internal yang mempengaruhi stabilitas produksi. Sementara itu, sektor ketersediaan pangan dan produksi hasil ternak secara keseluruhan menunjukkan pencapaian yang lebih optimal, dengan hampir semua target tercapai lebih dari 100%, mencerminkan bahwa kebijakan dan program yang dijalankan sudah cukup efektif.

Faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan pelayanan ini antara lain adalah:

1. Dukungan kebijakan yang efektif dari pemerintah daerah dalam hal distribusi pangan, pemeliharaan kesehatan ternak, serta peningkatan produksi pangan lokal.
2. Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai untuk mendukung kegiatan peternakan dan pertanian.
3. Pemeliharaan kesehatan ternak yang baik, serta adanya teknologi dalam peningkatan produktivitas hewan ternak.
4. Fluktuasi harga dan pasokan pakan ternak, yang mempengaruhi kualitas dan kuantitas hasil ternak.



Sementara itu, pada sektor yang belum mencapai target, seperti produksi domba dan produksi susu, faktor yang mempengaruhi ketidaktercapainya target dapat disebabkan oleh terbatasnya sumber daya, masalah kesehatan ternak, dan ketersediaan pakan yang tidak optimal. Kesenjangan juga dapat terjadi akibat kurangnya pemantauan dan pengawasan yang ketat terhadap program-program yang ada.

Sasaran Strategis 3: Meningkatnya Produksi Perikanan

Berdasarkan tabel diatas produksi perikanan menunjukkan tren peningkatan realisasi sejak kurun waktu 2022-2024. Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, diukur dengan 2 (dua) indikator sasaran, yaitu:

1. Indikator Sasaran Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap, Berdasarkan data produksi perikanan tahun 2022 sebesar 1,4% sedangkan presentase peningkatan produksi tahun 2023 sebesar 1,5% dan presentase kenaikan produksi tahun 2024 sebesar 1,6%. Dengan demikian, Tingkat capaian terhadap target produksi perikanan tangkap mengalami peningkatan setiap tahunnya, menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui target perencanaan. Persentase peningkatan produksi tangkap juga meningkat secara konsisten dari 1,4% menjadi 1,6%, mengindikasikan adanya tren positif dalam produktivitas nelayan. Beberapa faktor yang mendukung capaian ini antara lain:
 - a. Dukungan program Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan melalui bantuan sarana dan prasarana penangkapan ikan, Restocking Ikan guna menjaga populasi ikan di Perairan Umum Darat, bantuan premi asuransi nelayan, dan pelayanan rekomendasi pembelian Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi yang membantu meringankan beban operasional nelayan.
 - b. Adanya kelompok nelayan aktif dan terorganisir, seperti Pokmaswas dan KUB, yang berperan dalam menjaga keberlanjutan kegiatan penangkapan dan pengawasan sumber daya ikan.
 - c. Peran penyuluh perikanan dan pendamping lapangan yang terus melakukan edukasi kepada nelayan mengenai teknik penangkapan ramah lingkungan dan efisiensi bahan bakar.



- d. Peluang peningkatan hasil tangkap pada musim puncak (akhir tahun) yang masih terbuka, seiring dengan mulai membaiknya kondisi cuaca dan gelombang laut.

Namun tantangan yang masih perlu diperhatikan Adalah:

- a. Kondisi cuaca ekstrem dan gelombang tinggi pada awal hingga pertengahan tahun yang mengakibatkan nelayan tidak dapat melaut secara optimal, sehingga jam operasional penangkapan menurun drastis.
- b. Masih adanya praktik pengambek atau ijon yaitu sistem di mana nelayan menerima modal atau uang muka dari tengkulak (pengambek) sebelum melaut, dengan kesepakatan bahwa hasil tangkap nantinya harus dijual kembali kepada pengambek dengan harga yang lebih rendah dari harga pasar.
- c. Belum stabilnya pendataan kepemilikan kapal sehingga Menyulitkan dalam pendataan jumlah kapal aktif dan tidak aktif, yang berpengaruh pada akurasi data produksi perikanan tangkap dan Menghambat nelayan dalam mengakses bantuan pemerintah, seperti BBM bersubsidi, asuransi nelayan, dan bantuan alat tangkap

Secara keseluruhan, capaian ini menunjukkan bahwa sektor perikanan tangkap di Kabupaten/Kota masih menjadi tulang punggung utama produksi perikanan, dengan arah pertumbuhan yang positif dan berkelanjutan.

- 2. Indikator Sasaran persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya, Berdasarkan data produksi perikanan budidaya tersebut presentase kenaikan produksi tahun 2022 sebesar 1,4% sedangkan presentase kenaikan produksi tahun 2023 sebesar 1,5% dan presentase kenaikan produksi tahun 2024 sebesar 2%. Kinerja yang baik ini tidak lepas dari beberapa faktor pendukung, antara lain:
 - a. Ketersediaan sumber daya lahan dan perairan yang potensial, terutama kolam air tawar dan lahan sawah yang dapat dimanfaatkan untuk budidaya ikan konsumsi.
 - b. Dukungan program Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan, seperti bantuan benih, pakan, dan sarana produksi perikanan budidaya.



- c. Adanya kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) yang aktif, sehingga kegiatan budidaya tetap berjalan dan mudah dilakukan pendampingan teknis.
- d. Pendampingan teknis dan pelatihan dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan dan penyuluh perikanan dalam penerapan teknologi budidaya ramah lingkungan serta bimbingan teknis pakan alternatif.

Sementara itu, kendala yang masih dihadapi mencakup:

- a. Tingkat kematian ikan tinggi akibat perubahan cuaca ekstrem dan penurunan kualitas air, terutama pada periode musim kemarau panjang di 2025.
- b. Tingginya harga pakan ikan yang menyebabkan pembudidaya menurunkan jumlah tebar benih untuk mengurangi biaya operasional.
- c. Kegiatan usaha budidaya ikan didominasi pembudidaya skala kecil sehingga produktivitas masih rendah

Meskipun demikian, secara umum capaian produksi budidaya menunjukkan efisiensi dan ketahanan sistem budidaya lokal, serta kontribusi signifikan terhadap peningkatan pendapatan masyarakat dan ketahanan pangan daerah.

Sasaran Strategis 4: Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan yang Bersertifikat

Sasaran strategis meningkatnya produksi perikanan, diukur dengan 1 (satu) indikator sasaran, yaitu Persentase Produk Olahan Perikanan yang bersertifikat. Pada tahun 2022, Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 42 Unit sedangkan jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 25 unit sehingga perhitungan realisasi sebesar 60%. Pada tahun 2023, Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 51 unit sedangkan jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 35 unit, sehingga perhitungan realisasi sebesar 69%. Pada tahun 2024, Jumlah produk olahan perikanan sejumlah 63 unit sedangkan jumlah produk olahan yang bersertifikat sejumlah 55 unit sehingga perhitungan realisasi sebesar 87%.

Capaian persentase produk olahan perikanan yang bersertifikat menunjukkan fluktuasi, hal ini menggambarkan bahwa meskipun sempat menjadi penurunan capaian di awal periode, Upaya pembinaan dan pendampingan Kelompok Pengolah Pemasar

(Poklahsar) berhasil meningkatkan kesadaran pelaku usaha terhadap pentingnya sertifikasi mutu, halal, dan izin edar. Beberapa Langkah strategis yang menjadi pendukung keberhasilan dalam mencapai kinerja adakah:

- a. Ketersediaan bahan baku ikan lokal yang melimpah dari hasil perikanan tangkap dan budidaya, sehingga kegiatan pengolahan masih dapat berjalan.
- b. Adanya kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan (Poklahsar) yang aktif dan memiliki pengalaman dalam produksi berbagai jenis olahan ikan.
- c. Dukungan pemerintah daerah melalui pelatihan, bimbingan teknis (Bimtek), dan fasilitasi alat pengolahan ikan untuk peningkatan kapasitas produksi.
- d. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap konsumsi produk ikan olahan, seiring dengan kampanye *Gemarikan (Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan)*.

Sementara itu, kendala yang masih dihadapi mencakup:

- a. Terjadinya penurunan pasokan bahan baku ikan segar, terutama akibat rendahnya produksi perikanan tangkap dan budidaya pada semester pertama 2025.
- b. Kenaikan harga bahan penolong (seperti minyak goreng, tepung, dan kemasan) yang menurunkan margin keuntungan dan membuat pengolah mengurangi volume produksi.
- c. Belum optimalnya akses pemasaran digital dan distribusi produk olahan, terutama untuk skala kecil-menengah yang masih bergantung pada penjualan offline.
- d. Rendahnya daya serap pasar lokal terhadap produk olahan ikan tertentu, karena keterbatasan variasi produk dan inovasi rasa.

Secara keseluruhan, pencapaian kinerja pelayanan dinas ketahanan pangan, peternakan dan perikanan menunjukkan potensi yang besar dalam meningkatkan ketahanan pangan, sektor peternakan dan sektor perikanan namun tetap diperlukan evaluasi lebih lanjut untuk mengatasi kendala yang ada dan upaya untuk memperbaiki.



Tabel 2.6 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember (T-C.24.)

Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-				Realisasi Anggaran Pada Tahun-				Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	1.099.995.000	0	0	0	1.092.357.200	0	0		99,31 %	0,00%	0,00%		-100%	-100%
Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	1.390.157.170	507.363.500	1.090.591.625	1.600.761.500	1.194.313.032	502.295.027	87.002.900		85,91 %	99,00%	7,98%		4.81%	-70.31%
Program Penanganan Kerawanan Pangan	0	40.602.400	49.404.100	55.082.000	0	25.362.137	46.489.000		0,00%	62,46%	94,10%		16.47%	83.30%
Program Pengawasan Keamanan Pangan	0	0	9.164.400	15.023.050	0	0	8.951.500		0,00%	0,00%	97,68%		63.93%	0
Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	7.898.477.257	8.161.187.259	8.190.274.451	9.943.322.995	7,257,133,220	7.178.001.833	6.868.898.777		0,00%	87,95%	83,87%		7.98%	-2.70%
Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	708.975.751	3.452.582.700	2.449.580.000	2.428.714.000	706,329,760	2.881.807.760	447.324.958		0,00%	83,47%	18,26%		50.75%	111.76%
Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana	1.646.901.300	85.563.800	5.694.981.800	469.829.800	1,580,068,600	85.114.100	5.575.325.600		0,00%	99,47%	97,90%		134.33%	3177.90%



Uraian Program *)	Anggaran Pada Tahun-				Realisasi Anggaran Pada Tahun-				Rasion Antara Realisasi Dan Anggaran Tahun-				Rata-Rata Pertumbuhan	
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025	Anggaran	Realisasi
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	441.409.061	1.298.612.300	2.330.973.000	2.084.060.740	402.578.310	1.258.145.814	1.888.522.985		0,00%	96,88%	81,02%		67.76%	
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	4.699.093.135	900.227.500	7.615.994.704	7.950.522.729	4.002.606.377	4.090.557.323	6.287.757.267		85%	87%	83%		31%	29%
Program Pengelolaan Perikanan Tangkap	703.022.000	255.650.700	157.721.796	859.580.700	361.597.600	248.005.600	140.577.200		51%	97%	89%		-70%	-53%
Program Pengelolaan Perikanan Budidaya	1.246.877.000	1.299.313.500	292.820.804	783.356.000	1.139.946.575	1.230.877.432	279.945.000		91%	95%	96%		-35%	-30%
Program Pengawasan Sumber Daya dan Kelautan Perikanan	236.778.000	46.706.000	-		225.542.950	34.902.661	-		95%	75%	0%		-130%	-134%
Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	192.412.000	165.754.400	1.800.000.000	321.198.400	187.052.500	150.245.000	1.768.988.000		97%	91%	98%		47%	51%



Perbandingan antara anggaran dan realisasi ini menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Jember telah berhasil menyerap anggaran yang hampir mencapai 90% dari alokasi yang ditetapkan. Meskipun terjadi sedikit penurunan dalam hal pencapaian anggaran, hal ini masih menunjukkan tingkat efisiensi yang baik dalam penggunaan dana. Hal ini bisa disebabkan oleh faktor-faktor seperti penghematan dalam beberapa pos anggaran atau penundaan pelaksanaan kegiatan tertentu. Ke depan, untuk periode yang akan datang, perlu dilakukan evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab selisih ini guna meningkatkan perencanaan dan pelaksanaan anggaran yang lebih optimal, dengan tetap memperhatikan kualitas pelayanan dan hasil yang dicapai oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Jember.

Realisasi anggaran yang mencapai lebih dari 80-95% menunjukkan bahwa Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan telah mampu mengelola anggaran dengan baik, meskipun ada beberapa kendala yang menyebabkan sebagian anggaran belum terealisasi sepenuhnya. Hal ini memberikan gambaran positif terhadap efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan ketahanan pangan dan sektor peternakan di Kabupaten Jember.

Pencapaian ini juga mencerminkan komitmen Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan dalam melaksanakan program-program yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, terutama dalam hal penyediaan pangan yang berkualitas dan peningkatan produktivitas peternakan. Ke depan, evaluasi terhadap penggunaan anggaran yang belum terealisasi dapat dijadikan dasar untuk perencanaan anggaran yang lebih akurat dan tepat sasaran di tahun-tahun berikutnya, sehingga setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk keberlanjutan program ketahanan pangan dan peternakan yang lebih efektif.

Dengan tingkat realisasi anggaran yang baik, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember diharapkan dapat terus mengembangkan program-program strategis yang dapat meningkatkan daya saing sektor pangan dan peternakan, serta mewujudkan kemandirian pangan yang lebih kuat bagi masyarakat Jember.



Selama periode 2022 hingga 2024, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember telah menunjukkan komitmen yang signifikan dalam pengelolaan anggaran untuk mendukung program-program ketahanan pangan dan peternakan yang berdampak langsung pada kesejahteraan masyarakat. Pada tahun 2022, alokasi anggaran yang ditetapkan sebesar Rp 20.264.097.674 (dua puluh milyar dua ratus enam puluh empat juta sembilan puluh tujuh ribu enam ratus tujuh puluh empat rupiah) berhasil direalisasikan sebesar Rp 18.149.526.124 (delapan belas milyar seratus empat puluh sembilan juta lima ratus dua puluh enam ribu seratus dua puluh empat rupiah), dengan persentase realisasi anggaran mencapai 89,56%. Hal ini mencerminkan efisiensi dalam penggunaan anggaran meskipun terdapat beberapa faktor yang menyebabkan penundaan dalam pelaksanaan beberapa kegiatan.

Pada tahun 2023 alokasi anggaran sebesar Rp 20.028.928.122 (dua puluh milyar dua puluh delapan juta sembilan ratus dua puluh delapan ribu seratus dua puluh dua rupiah). Realisasi anggaran tahun ini tercatat sebesar Rp 17.685.314.687 (tujuh belas milyar enam ratus delapan puluh lima juta tiga ratus empat belas ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah), dengan rasio realisasi sebesar 88,29%. Hal ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran tergolong efektif dan cukup optimal, meskipun belum mencapai 100%. Hal ini mengindikasikan bahwa sebagian besar kegiatan yang telah direncanakan dapat terlaksana dengan baik, sementara masih terdapat sebagian kecil kegiatan yang belum terealisasi sepenuhnya karena beberapa faktor teknis dan administratif

Tahun 2024 menunjukkan alokasi anggaran yang lebih besar, yakni Rp 29.681.506.680 (dua puluh sembilan milyar enam ratus delapan puluh satu juta lima ratus enam ribu enam ratus delapan puluh rupiah), dengan realisasi anggaran sebesar Rp 23.399.783.187 (dua puluh tiga milyar tiga ratus sembilan puluh Sembilan juta tujuh ratus delapan puluh tiga seratus delapan puluh tujuh rupiah), yang mencapai 78,83% dari anggaran yang dialokasikan. Meskipun terdapat penurunan dalam persentase realisasi, hal ini masih menunjukkan adanya upaya yang baik dalam pengelolaan anggaran untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Secara keseluruhan, meskipun terdapat fluktuasi dalam persentase realisasi anggaran dari tahun ke tahun, Dinas



Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember telah berusaha maksimal dalam mengoptimalkan penggunaan anggaran yang tersedia. Ke depannya, evaluasi mendalam terhadap faktor penyebab selisih anggaran dan perencanaan yang lebih matang akan sangat penting untuk memastikan setiap anggaran yang dialokasikan dapat dimanfaatkan secara optimal, sehingga program ketahanan pangan dan peternakan dapat terus berkembang, memberikan dampak positif bagi masyarakat, dan mendukung kemandirian pangan yang lebih kuat di Kabupaten Jember.

2.1.2 Kelompok sasaran layanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Pembangunan daerah serta mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan berbasis teknologi informasi, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan, Perikanan Kabupaten Jember menetapkan kelompok sasaran pelayanan sebagai bagian penting dari strategi pelayanan publik. Kelompok sasaran ini mencerminkan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung menerima manfaat dari program, kegiatan, dan layanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan, Perikanan Kabupaten Jember.

Adapun kelompok sasaran pelayanan yang menjadi fokus utama dalam rencana strategis tahun 2025-2029 ini meliputi:

1. Bidang Ketahanan Pangan

- a. Rumah Tangga Rentan Pangan, Termasuk keluarga berpendapatan rendah, lansia tunggal, ibu hamil dan menyusui, serta rumah tangga dengan balita stunting.
- b. Kelompok Tani dan Wanita Tani, Sebagai pelaku utama produksi dan pengelolaan pangan lokal, termasuk peserta program Pekarangan Pangan Lestari (P2L).
- c. Masyarakat di Wilayah Rawan Bencana dan Terpencil, Untuk penguatan cadangan pangan dan distribusi darurat.
- d. Pelajar dan Santri, Sebagai agen perubahan pola konsumsi dan edukasi gizi berbasis lokal.



- e. UMKM Pangan Lokal, Produsen olahan pangan berbasis sumber daya lokal yang berpotensi meningkatkan diversifikasi dan ketahanan ekonomi.

2. Bidang Peternakan

- a. Kelompok ternak dan Gapoknak sebagai penggerak kelembagaan dan distribusi.
- b. Terbangunnya sistem pengendalian penyakit hewan dan layanan kesehatan veteriner.
- c. Meningkatnya produksi dan konsumsi produk hewani yang ASUH (Aman, Sehat, Utuh, Halal).
- d. Terintegrasinya RPH, TPU, dan unit pengolahan hasil ternak dalam rantai nilai lokal.
- e. Penguatan SDM peternakan: penyuluh, paramedik, dan pengelola kelembagaan.

3. Bidang Perikanan

- a. Pelaku usaha perikanan sebagai pelaku utama produksi dan penggerak sektor perikanan daerah
- b. Kelompok Usaha Bersama (KUB) adalah kelompok yang beranggotakan nelayan dalam melakukan kegiatan usaha penangkapan ikan secara Bersama-sama, baik dalam hal pengelolaan peralatan, hasil tangkapan, maupun pembiayaan.
- c. Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan) yang terdiri dari sekelompok orang yang melakukan kegiatan budidaya ikan secara bersama-sama dan terorganisir untuk mencapai tujuan bersama dalam bidang perikanan budidaya
- d. Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) adalah Kelompok masyarakat pesisir yang berpartisipasi dalam pengawasan sumber daya ikan dan kelestarian lingkungan perairan
- e. Kelompok Pengolah dan Pemasaran Hasil Perikanan (Poklahsar) adalah pelaku usaha kecil dan menengah yang mengolah hasil perikanan menjadi produk bernilai tambah
- f. Masyarakat Umum dan Konsumen adalah Warga yang menikmati hasil perikanan baik sebagai konsumen pangan maupun penerima manfaat program sosial.



Dengan uraian layanan sebagai berikut:

- a. Rekomendasi perizinan meliputi:
 - 1) Rekomendasi perizinan usaha perikanan tangkap;
 - 2) Rekomendasi perizinan perikanan budidaya;
 - 3) Rekomendasi perizinan usaha pengolahan dan pemasaran.
- b. Pelatihan dan pembinaan Kelompok Usaha Bersama (KUB) Nelayan
- c. Pelatihan dan pembinaan Kelompok Pengolah dan Pemasar Hasil Perikanan (Poklahsar)
- d. Pelatihan dan pembinaan Kelompok Pembudidaya Ikan (Pokdakan)
- e. Pembinaan dan pengawasan Sumber Daya Perikanan melalui Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan (Pokmaswas)
- f. Fasilitasi dan bantuan teknis budidaya ikan
- g. Fasilitasi pengembangan usaha produk kelautan dan perikanan
- h. Penyediaan benih ikan unggul Restocking ikan di perairan umum dan daratan
- i. Fasilitasi kegiatan praktek, penelitian dan magang bidang perikanan bagi pelajar dan mahasiswa.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Ketahanan pangan, Peternakan dan Perikanan

Penentuan isu-isu strategis dirumuskan berdasarkan hasil evaluasi terhadap organisasi dan tupoksi, sumber daya, kinerja pelayanan dan juga tantangan eksternal atau isu-isu strategis yang sedang berkembang di masyarakat dan perlu penanganan secara terprogram/terencana.

Isu strategis merupakan keadaan saat ini yang harus dirancang penanganannya dalam rangka pelaksanaan tupoksi yaitu pelaksanaan kinerja pembangunan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat, yang berpotensi akan menjadi hambatan dan kendala dalam pengembangan organisasi serta peluang dan tantangan yang berasal dari sisi eksternal seperti perkembangan/pertumbuhan ekonomi dan sosial diberbagai level apabila tidak ditangani secara terprogram.



Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 18 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan daerah di bidang Pangan, bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan serta tugas pembantuan. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk perumusan kebijakan daerah di bidang Pangan bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan kebijakan daerah di bidang bidang Pangan bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang Pangan bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan, pelaksanaan administrasi dinas di bidang Pangan bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan serta pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan, Perikanan Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Ketahanan, Peternakan dan Perikanan. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
Turunnya Skor Pola Pangan Harapan	1. Belum optimalnya Ketersediaan, ketercukupan konsumsi, dan keamanan pangan masyarakat	1. Kurangnya konektivitas antara pelaku usaha pangan dan pertanian dengan permintaan pasar 2. Belum semua komoditas pangan tersedia dalam jumlah yang cukup sepanjang waktu dikarenakan Infrastruktur dan sistem pendukung kemandirian pangan yang belum memadai 3. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai pentingnya keamanan pangan, yang berdampak pada tingginya konsumsi pangan yang tidak aman



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
		4. Rendahnya manajemen kelembagaan petani yang menghambat optimalisasi potensi sektor pertanian dalam meningkatkan ketahanan pangan
	2. Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	1. Tingkat higienitas produk peternakan yang masih kurang karena Manajemen kelembagaan kelompok peternak yang belum kuat menyebabkan masalah dalam hal kebersihan dan keamanan produk peternakan. 2. Belum optimalnya penggunaan bahan pakan lokal 3. Belum optimalnya kualitas bibit ternak 4. Belum optimalnya kualitas SDM Peternakan
	3. Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk hasil ternak	1. Rendahnya mutu produk peternakan yang memenuhi standar Kesehatan hewan Masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan 2. Belum optimalnya akses pasar produk peternakan 3. Rendahnya Tingkat konsumsi daging 4. Belum optimalnya teknologi kemasan produk hasil peternakan 5. Rendahnya diversifikasi produk asal ternak yang bernilai tambah dari usaha peternakan rakyat 6. Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk olahan peternakan terakses informasi, teknologi dan permodalan 7. Tingginya persaingan produk local dan impor dari segi harga dan kualitas



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	4. Belum optimalnya produksi bibit komoditas peternakan unggul	1. Rendahnya jumlah bibit dan pakan yang dihasilkan 2. Rendahnya mutu genetik ternak 3. Terbatasnya jumlah Kawasan pembibitan
	5. Kurangnya sarana dan prasarana peternakan	1. Rendahnya jumlah kualitas sarana dan prasarana Kesehatan ternak seperti: Poskeswan, Rumah Potong Hewan (RPH) dan laboratorium kesehatan hewan dan Kesehatan Masyarakat veteriner (kesmavet)
Rendahnya kontribusi ekonomi sektor perikanan terhadap total PDRB daerah	6. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap	1. Belum optimalnya kualitas SDM nelayan 2. Menurunnya stok sumber daya ikan akibat penangkapan berlebih (Overfishing) dan IUU (Illegal, Unreported, and Unregulated) Fishing yaitu kegiatan penangkapan ikan yang tidak sah, tidak dilaporkan, dan tidak diatur. 3. Belum memadainya sarana dan prasarana pelabuhan perikanan 4. Belum optimalnya teknologi penangkapan ikan. 5. Belum optimalnya kesadaran nelayan untuk mengurus dokumen administrasi 6. Belum optimalnya nelayan yang terakses informasi, teknologi dan permodalan. 7. Ketergantungan nelayan kepada pengambek karena kurangnya modal usaha.



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	7. Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	1. Belum optimalnya kualitas SDM Pembudidaya 2. Belum optimalnya teknologi pembudidaya ikan 3. Belum optimalnya kualitas benih ikan dan induk unggul 4. Tingginya harga pakan ikan 5. Belum optimalnya penerapan CPIB (cara pembenihan ikan yg baik) dan CBIB (cara budidaya ikan yg baik) 6. Belum optimalnya pembudidaya ikan yang terakses informasi, teknologi dan permodalan
	8. Belum Optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk perikanan	1. Belum optimalnya kualitas Pengolahan 2. Belum optimalnya akses pasar Produk Perikanan 3. Belum optimalnya kapasitas usaha pengolahan dan pemasaran 4. Rendahnya tingkat konsumsi ikan 5. Belum optimalnya teknologi kemasan produk hasil perikanan 6. Belum optimalnya pengolah dan pemasar ikan yang terakses informasi, teknologi dan permodalan 7. Belum optimalnya produk hasil perikanan yang bersertifikat mutu 8. Belum optimalnya ragam produk hasil perikanan
	9. Degradasi fungsi pemanfaatan sumber daya kelautan perikanan	1. Bertambah luasnya kerusakan mangrove 2. Lemahnya penegakan hukum yang menyebabkan terjadinya praktik perikanan ilegal dan tidak berkelanjutan



Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
	10. Belum optimalnya pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan	1. Belum optimalnya kualitas SDM Pengawas 2. Minimnya sarana dan prasarana pengawasan 3. Rendahnya kesadaran dan partisipasi masyarakat

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

“DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU”

Visi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember mengandung empat kata kunci yang selanjutnya disebut sebagai pokok visi, yakni: “Dengan Cinta”, “Jember Baru”, “Sejahtera”, dan “Maju”. Makna yang terkandung dalam visi tersebut dijabarkan berdasarkan pokok visi sebagai berikut:

1. Pokok Visi pertama: “Dengan Cinta”

Pokok visi yang pertama, yaitu “dengan cinta” mengandung makna yang mendalam karena terkait dengan semangat (spirit) dan kesungguhan seluruh actor pembangunan (Stakeholders) dalam membangun Kabupaten Jember ke depan. Makna visi dengan cinta merupakan bentuk penurunan dari pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu “berakhlak” yang merujuk pada bentuk perilaku yang baik, santun, berbudi pekerti luhur, menjunjung tinggi nilai moral dan etika. Secara spesifik dari sisi pemerintah daerah sebagai fasilitator dan pelayan masyarakat menekankan bahwa Kabupaten Jember menjadi daerah yang siap melayani sepenuh hati, sebagai bentuk dari cinta dan akhlak yang baik untuk kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi “dengan cinta” menekankan pentingnya keikhlasan dan pengabdian dalam setiap layanan dan tata kelola yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk membangun dan memajukan Kabupaten Jember. Dengan cinta dan dedikasi yang tinggi saat menjalankan proses



pembangunan diharapkan dapat membawa perubahan positif yang berkelanjutan dan merata bagi Pembangunan daerah dan masyarakat di Kabupaten Jember. Implementasi tata kelola pemerintahan dan layanan kepada masyarakat dengan penuh cinta dan dedikasi yang tinggi dapat diwujudkan dengan adanya komitmen untuk membangun birokrasi yang professional dan humanis. Dengan adanya penguatan pada regulasi yang adaptif, inovatif dan berkeadilan serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi pelayanan publik, maka harapan Kabupaten Jember lebih maju akan dapat terwujud.

2. Pokok Visi kedua: “Jember Baru”

Pokok visi kedua, yaitu “Jember baru” bermakna bahwa dengan semangat baru “dengan cinta” maka berbagai sumberdaya dapat didayagunakan dengan optimal. Jember Baru adalah pandangan ke depan (vision) mengenai perubahan nyata dalam peningkatan taraf kesejahteraan masyarakat yang ditandai dengan peningkatan kualitas pada aspek ekonomi, sumber daya manusia, pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan bidang lainnya. Perwujudan “Jember Baru” dimaksudkan agar Kabupaten Jember senantiasa bergerak dan bertransformasi terus menerus menjadi kabupaten yang siap menghadapi segala tantangan internal maupun eksternal, siap menghadapi perubahan dan perkembangan teknologi informasi, serta siap bersaing. Dengan demikian, pokok visi “Jember baru” ini juga mengakomodir pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu “berdaya saing”. Harapan utama adanya transformasi daerah menjadi “Jember Baru” memiliki makna bahwa kualitas hidup Masyarakat dapat meningkat dengan adanya ketersediaan akses yang lebih baik terhadap pendidikan, layanan kesehatan, lapangan pekerjaan, serta infrastruktur dasar. Peningkatan kualitas dan akses pendidikan dan kesehatan bertujuan untuk menciptakan sumber daya manusia yang unggul, kompeten, dan berdaya saing.

3. Pokok Visi ketiga: “Sejahtera”

Pokok visi ketiga, yaitu “Sejahtera” merupakan puncak (Ultimate) dari tujuan pembangunan masyarakat. Sejahtera mencakup berbagai aspek kehidupan yang



terintegrasi dan berjalan harmonis untuk mencapai kondisi ideal bagi seluruh masyarakat di Kabupaten Jember. Pokok visi sejahtera menggambarkan kesejahteraan ekonomi dan sosial di Kabupaten Jember. Kesejahteraan pada aspek ekonomi meliputi penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan masyarakat, dan aktivitas sektor riil yang dinamis sebagai salah satu indikator stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi yang kondusif dapat berdampak pada daya beli yang stabil, Dimana daya beli yang stabil merupakan unsur penting pendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan dalam jangka waktu yang lama (Long Term). Sedangkan kesejahteraan sosial mencakup kesetaraan akses dalam setiap pelayanan dasar, meliputi layanan pendidikan, kesehatan, kesetaraan, kebebasan politik, seni, budaya dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan, serta dukungan infrastruktur perumahan yang layak.

4. Pokok Visi keempat: “Maju”

Pokok visi keempat, yaitu “Maju” merupakan perwujudan Kabupaten Jember yang mengalami kemajuan di segala bidang secara terus menerus. Kemajuan di segala bidang berarti bahwa daerah selalu dinamis, sehingga perkembangan di dunia dapat selalu diikuti dengan tetap memperhatikan kondisi daerah. Oleh karenanya, Kabupaten Jember mengartikulasikan kata “Maju” pada dua lokus utama, yaitu: pertama, percepatan pembangunan di tingkat pedesaan yang diorientasikan untuk pencapaian desa yang mandiri dengan berbasis potensi lokal yang berlimpah. Kemajuan desa merupakan kekuatan yang masif dan dapat menimbulkan dampak yang besar bagi kemajuan daerah. Kedua, ditekankan pada wilayah perkotaan (Urban Area) sebagai upaya membangun keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam, Orientasi pembangunan kota dilakukan berbasis Green Policy dengan penerapan tata kelola sumberdaya alam yang berkelanjutan dan berkeadilan. Dengan prinsip keseimbangan pembangunan dan kelestarian alam ini, Kabupaten Jember berupaya untuk tetap memperhatikan pokok visi RPJPD Kabupaten Jember, yaitu “berkelanjutan”. Implementasi maju pada perwujudan desa mandiri dan penataan kota berbasis green policy merupakan upaya untuk menjadikan setiap wilayah di Kabupaten Jember, baik desa maupun kota sebagai wilayah yang maju melalui proses pembangunan yang



disesuaikan dengan karakteristik wilayah, sehingga dapat lebih mudah diimplementasikan dan diinternalisasi oleh publik. Makna yang terkandung dalam visi dijabarkan berdasarkan Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember 2025-2029 pada gambar sebagai berikut.

Gambar 2.1
Pokok Visi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten
Jember Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029

Sedangkan misi pembangunan jangka menengah Kabupaten Jember dirumuskan sebagai bentuk langkah-langkah atau upaya untuk mewujudkan visi pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember. Terdapat 5 (lima) misi yang dirumuskan untuk mendukung pembangunan jangka menengah di Kabupaten Jember tahun 2025-2029 sebagai berikut:

Gambar 2.2.1
Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Jember
Tahun 2025-2029



Sumber: RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029



Dari lima tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember adalah terkait misi ke 5 yaitu:

“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan”

dengan tujuan:

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Merata”

Untuk mencapai misi dan tujuan tersebut Sasaran RPJMD yang mendukung adalah meningkatnya kontribusi sectoral ekonomi, investasi daerah, peningkatan lapangan kerja dan berkembangnya potensi lokal.

Atas dasar Tujuan dan Sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember, dengan memperhatikan Tugas dan Fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang pangan bidang peternakan dan bidang kelautan dan perikanan menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan adalah **“Meningkatnya Ketahanan Pangan serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan, dan Perikanan”** dengan 2 (dua) indikator tujuan yaitu Skor Pola Pangan Harapan (Nilai) dan Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%).

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bidang Perikanan terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Misi ke-5 “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan”	Potensi lahan pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan yang luas serta iklim yang mendukung produksi pangan	Terjadi degradasi lahan, pencemaran lingkungan, dan dampak perubahan iklim yang memengaruhi produktivitas
		Adanya penerapan teknologi budidaya modern, pakan	Rendahnya literasi digital dan kemampuan adaptasi teknologi



No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		alternatif, dan digitalisasi	di tingkat pelaku usaha
		Kelembagaan kelompok tani, kelompok nelayan, gabungan kelompok peternak dan poklhasr semakin aktif mendukung program pemerintah	Tidak semua kelompok aktif atau memiliki kelembagaan yang kuat dalam manajemen usaha
		Adanya bantuan peralatan, infrastruktur, dan sarana pendukung produksi dari Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan	Kondisi infrastruktur produksi dan distribusi masih belum merata.
		Berkembangnya jaringan pemasaran dan promosi produk hasil perikanan dan peternakan lokal.	Fluktuasi harga hasil produksi dan lemahnya rantai pasok
		Tersedianya anggaran tahunan yang dikelola secara efisien dan efektif untuk mendukung program ketahanan pangan, peternakan dan perikanan	Keterbatasan alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana ketahanan pangan, peternakan dan perikanan
		Struktur organisasi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi serta dilengkapi SDM dan tenaga teknis yang kompeten untuk pelaksanaan pelayanan.	Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada belum sepenuhnya dipahami dan diimplementasikan dengan baik oleh pelaksana pelayanan
		Adanya penetapan target kinerja dan	Keterbatasan sarana dan



No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		indikator capaian yang jelas bagi setiap unit di bidang ketahanan pangan, peternakan dan perikanan	prasarana yang mendukung pelaksanaan program ketahanan pangan, peternakan dan perikanan

2.2.1.1 Telaahan Renstra Kementerian

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 telah disusun dengan memperhatikan arah kebijakan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam visi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia yaitu **“Bersama Indonesia Maju Menuju Indonesia Emas 2045”** serta 8 (delapan) misi Astacita. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, bidang pertanian khususnya sub sektor peternakan, bidang kelautan dan perikanan sebagai bagian dari Astacita/Prioritas Nasional pada Misi Kedua dan Misi Kelima Presiden, yaitu:

1. Misi Kedua: Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru
2. Misi Kelima: Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri.

Selanjutnya, Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember diselaraskan dengan Renstra Kementerian/Lembaga yang menaungi tiga urusan pemerintah tersebut yaitu:

1. Badan Pangan Nasional (Bapanas)

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk bidang pangan Badan Pangan Nasional mendukung terwujudnya Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden,



yaitu “Terwujudnya Ketahanan Pangan Nasional berbasis kedaulatan dan kemandirian pangan yang tangguh dan berkelanjutan untuk Indonesia maju yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berdasarkan gotong royong”. Dengan misi yang juga mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden yaitu:

- 1) Memperkuat ketersediaan dan Cadangan pangan
- 2) Memantapkan stabilitas pasokan dan harga pangan
- 3) Mengentaskan kerawanan pangan dan gizi
- 4) Menjamin keamanan dan mutu pangan segar
- 5) Mengoptimalkan pemanfaatan pangan dan gizi yang berkualitas untuk hidup sehat, aktif dan produktif
- 6) Mengelola Badan Pangan Nasional yang bersih, efektif dan terpercaya

Menjabarkan misi pembangunan maka tujuan Badan Pangan Nasional meliputi:

- 1) Meningkatkan ketersediaan dan Cadangan pangan yang bersumber dari produksi dalam negeri
- 2) Memperkuat sistem logistik pangan
- 3) Menurunkan daerah rentan rawan pangan dan Masyarakat yang tidak berkecukupan pangan dan gizi
- 4) Meningkatkan konsumsi pangan Masyarakat yang beragam dan bergizi seimbang berbasis potensi sumberdaya lokal
- 5) Meningkatkan jaminan keamanan dan mutu pangan segar
- 6) Meningkatkan tata Kelola organisasi Badan Pangan Nasional dalam mewujudkan organisasi yang transparan, akuntabel, profesional dan berintegritas tinggi dalam memberikan layanan kepada Masyarakat.



Tabel permasalahan pelayanan berdasarkan sasaran Badan Pangan Nasional

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Peningkatan Ketahanan Pangan	Kurangnya sistem distribusi pangan yang efektif dan belum meratanya pasokan pangan ke seluruh daerah.	Potensi sektor peternakan yang melimpah dan dukungan dari pemerintah untuk meningkatkan ketersediaan pangan.	Keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi yang menghambat akses pangan di wilayah terpencil.
Peningkatan Kualitas Pangan	Kualitas pangan lokal, terutama produk peternakan, yang belum memenuhi standar keamanan pangan.	Adanya kesadaran masyarakat akan pentingnya konsumsi pangan yang aman dan bergizi.	Kurangnya fasilitas untuk pemeriksaan dan pengawasan kualitas pangan serta teknologi pengolahan yang masih terbatas.

2. Kementerian Pertanian (Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan)

Sebagai organisasi yang membantu presiden untuk bidang peternakan. Kementerian Pertanian Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan mendukung terwujudnya Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya kedaulatan dan keamanan pangan nasional ternak”. Dengan misi yang juga mendukung visi dan misi presiden dan wakil presiden yaitu:

- 1) Mewujudkan ketahanan pangan nasional ternak
- 2) Meningkatkan nilai tambah dan daya saing ternak dan produk ternak



- 3) Mengembangkan usaha di bidang peternakan dan Kesehatan hewan berkelanjutan
- 4) Meningkatkan akuntabilitas dan kualitas pelayanan publik bidang peternakan dan Kesehatan hewan

Tabel permasalahan pelayanan berdasarkan sasaran Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia di Peternakan	Terbatasnya kapasitas peternak dalam mengelola usaha secara efisien dan berkelanjutan.	Program pelatihan dan pendampingan untuk peternak yang diselenggarakan oleh pemerintah.	Akses terbatas terhadap teknologi modern dan pelatihan yang dibutuhkan untuk meningkatkan keterampilan peternak.
Pengembangan Infrastruktur Peternakan	Infrastruktur yang belum memadai dalam mendukung pengolahan dan distribusi produk peternakan.	Pembangunan fasilitas pengolahan dan distribusi pangan peternakan oleh pemerintah.	Terbatasnya dana dan perencanaan yang tidak terintegrasi dengan sektor lainnya untuk mendukung pengembangan peternakan.
Peningkatan Kemandirian Pangan Daerah	Ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, baik untuk bahan pangan pokok maupun produk peternakan.	Potensi pengembangan peternakan yang dapat mendukung kemandirian pangan daerah.	Keterbatasan dalam pengelolaan dan pengembangan potensi lokal dalam sektor peternakan dan pangan daerah.

3. Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP)



Sebagai organisasi yang juga membantu presiden untuk urusan kelautan dan perikanan, Kementerian Kelautan Perikanan Republik Indonesia mendukung terwujudnya Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden, yaitu “Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk Mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Mengacu pada tugas, fungsi dan wewenang yang telah dimandatkan dalam peraturan perundang-undangan misi Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sesuai Visi-Misi Presiden dan Wakil Presiden yaitu:

- 1) Peningkatan kualitas manusia Indonesia melalui peningkatan daya saing Sumber Daya Manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan;
- 2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui peningkatan kontribusi ekonomi sector kelautan dan perikanan terhadap perekonomian sosial;
- 3) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, melalui peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan; dan
- 4) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif dan terpercaya melalui peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP.

Menjabarkan misi pembangunan kelautan dan perikanan, maka tujuan pembangunan kelautan dan perikanan, meliputi:

- 1) Peningkatan daya saing sumber daya manusia kelautan dan perikanan dan pengembangan inovasi dan riset kelautan dan perikanan dengan tujuan:
 - a. Meningkatnya kapasitas dan kompetensi SDM Kelautan dan Perikanan; dan



- b. Menguatnya inovasi dan riset kelautan dan perikanan.
 - 2) Peningkatan kontribusi ekonomi sektor kelautan dan perikanan terhadap perekonomian nasional dengan tujuan:
 - a. Optimalisasi pengelolaan sumber daya perikanan budidaya dan perikanan tangkap;
 - b. Meningkatnya mutu, daya saing dan penguatan system logistic hasil kelautan dan perikanan;
 - c. Meningkatnya pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
 - d. Meningkatnya system perkarantinaan ikan, pengendalian mutu, kemananan hasil perikanan dan keamanan hayati ikan; dan
 - e. Optimalnya pengelolaan ruang laut.
 - 3) Peningkatan kelestarian sumber daya kelautan dan perikanan, dengan tujuan optimalnya konservasi dan pengelolaan kerusakan pesisir dan pulau-pulau kecil.
 - 4) Peningkatan tata kelola pemerintahan di KKP, dengan tujuan meningkatnya kinerja reformasi birokrasi KKP.

dengan tujuan memperluas perlindungan, mengurangi tekanan/dampak negative kegiatan manusia, melestarikan dan menjaga keberlanjutan ekosistem laut dan layanan ekosistemnya Kementerian Kelautan dan Perikanan melakukan 5 (lima) kebijakan ekonomi biru yang menjadi agenda prioritas Kementerian Kelautan dan Perikanan yaitu:

- 1) Memperluas Kawasan konservasi laut
- 2) Penangkapan ikan terukur berbasis kuota
- 3) Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan



- 4) Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil
- 5) Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan

Tabel permasalahan pelayanan berdasarkan sasaran Kementerian dan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Memperluas Kawasan konservasi laut	Degradasi keberagaman biota laut karena aktivitas manusia	Adanya 30% target luas kawasan konservasi nasional dan penguatan system pemantauan, monitoring dan pengawasan Kawasan konservasi berbasis IT/Satelit	Tekanan aktivitas ekonomi seperti tambak, wisata dan tambang
Penangkapan ikan terukur berbasis kuota	Penurunan stok ikan akibat penangkapan ikan berlebihan dan IUU Fishing	Dukungan regulasi nasional PP No 11/2023 tentang penangkapan ikan terukur, pengembangan kampung nelayan modern dan penataan perizinan kapal	Praktek penangkapan ikan belum selektif, industri dan rantai bisnis yang tidak efisien.
Pengembangan perikanan budi daya di laut, pesisir, dan darat yang berkelanjutan	Rendahnya efisiensi dan produktivitas usaha karena skala kecil dan belum terintegrasi hulu-hilir	Revitalisasi dan modeling teknologi budidaya yang produktif dan ramah lingkungan, membangun kampung perikanan berbasis kearifan lokal dan pengembangan	Bahan baku pakan masih bergantung pada produk impor dan belum semua pembudidaya menerapkan SOP GAP (Good



Sasaran Renstra K/L	Permasalahan PD terkait Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
		n induk dan benih unggul	Aquaculture Practices)
Pengawasan dan pengendalian wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil	Masih tingginya alih fungsi lahan pesisir tanpa izin (tambak, pariwisata, industri)	Penyelenggaraan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang laut (KKPRL) untuk kegiatan pemerintah, dunia usaha, dan Masyarakat serta pengelolaan hasil sedimentasi di laut	Kegiatan pemanfaatan pulau-pulau kecil yang merusak, tidak memiliki izin/illegal, tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan dan penurunan daya dukung ekosistem sensitive di laut akibat proses sedimentasi di laut.
Pembersihan sampah plastik di laut melalui Gerakan partisipasi nelayan	Masih tingginya pencemaran laut dari aktivitas pesisir dan kapal	Pengembangan ekonomi sirkuler dari pengolahan sampah plastik di laut dan pengembangan system monitoring dan pengawasan	Kesadaran masyarakat masih rendah untuk menjaga laut dari sampah plastik

Kabupaten Jember memiliki potensi agraris dan maritim yang luar biasa, apabila dikelola secara berkelanjutan dapat menjadi kekuatan utama mewujudkan ketahanan pangan daerah yang Tangguh dan inklusif. Melalui sinergi antar sektor pangan, peternakan, dan perikanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan, Perikanan Kabupaten Jember memiliki Langkah strategis menuju kemandirian pangan serta kesejahteraan masyarakat, sejalan dengan arah kebijakan Pembangunan nasional.



Pada sektor pangan, fokus pembangunan diarahkan pada terjaminnya ketersediaan, keterjangkauan, dan keamanan pangan bagi seluruh masyarakat. Inovasi dalam sistem logistik, penguatan cadangan pangan daerah, serta pengembangan diversifikasi konsumsi pangan berbasis sumber daya lokal menjadi langkah nyata dalam menjaga stabilitas dan ketahanan pangan. Upaya ini selaras dengan RENSTRA Badan Pangan Nasional (BAPANAS) yang menekankan pentingnya pemenuhan pangan yang aman, bergizi, dan berkelanjutan, sekaligus mendorong transformasi sistem pangan menuju ketahanan dan kemandirian pangan nasional.

Sementara itu, sektor peternakan menjadi pilar penting dalam menciptakan sumber protein hewani yang berkualitas bagi masyarakat. Melalui peningkatan produktivitas dan efisiensi usaha peternakan, penguatan kelembagaan peternak, serta penerapan teknologi tepat guna dan pakan alternatif, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember berkomitmen untuk memperkuat rantai pasok pangan hewani yang berdaya saing. Pendekatan ini sejalan dengan arah RENSTRA Kementerian Pertanian, yang menitikberatkan pada penguatan ketahanan pangan domestik, peningkatan produksi ternak, dan kesejahteraan peternak melalui sistem agribisnis yang terintegrasi dan berkelanjutan.

Adapun sektor perikanan memainkan peran strategis dalam memperkuat ekonomi biru daerah. Potensi sumber daya perikanan tangkap dan budidaya yang melimpah menjadi modal besar dalam mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat pesisir dan pembudidaya ikan. Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember mendukung terwujudnya industri perikanan yang produktif, inovatif, dan berwawasan lingkungan. Arah ini sejalan dengan RENSTRA Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) 2025–2029, yang menitikberatkan pada:

1. Memperluas Kawasan konservasi laut;



2. Penangkapan ikan terukur berbasis kuota;
3. Mengembangkan Budidaya air laut, tawar, payau yang berkelanjutan;
4. Pengelolaan dan pengawasan pesisir dan pulau-pulau kecil;
5. Penanganan sampah plastik di laut melalui Gerakan Partisipasi Nelayan atau Bulan Cinta Laut (BCL)

Dalam implementasinya Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember menyadari bahwa upaya mewujudkan ketahanan pangan, peternakan, dan perikanan tidak terlepas dari tantangan seperti keterbatasan infrastruktur pengolahan dan distribusi, akses terhadap teknologi modern, serta perubahan iklim yang mempengaruhi produktivitas. Namun, dengan potensi sumber daya alam yang melimpah, dukungan kebijakan nasional, serta komitmen kolaboratif, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember optimis mampu membangun sistem pangan, peternakan, dan perikanan yang berkelanjutan, tangguh, dan berkeadilan sosial.

Melalui arah kebijakan yang sinergis dengan RENSTRA Kementerian Pertanian, Kementerian Kelautan dan Perikanan, serta Badan Pangan Nasional, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember meneguhkan tekad untuk menjadi daerah mandiri pangan, maju dalam peternakan, dan unggul di bidang perikanan, demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera, sehat, dan berdaya saing global.

2.2.1.2 Telaahan Renstra Provinsi Jawa Timur

Visi Pembangunan daerah provinsi jawa timur untuk periode RPJMD 2025-2029 sesuai dengan visi kepala daerah terpilih adalah “Bersama Jawa Timur Maju yang Adil, Makmur, Unggul, dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas 2045” dengan misi Provinsi Jawa Timur adalah sebagai berikut:



1. Jatim Sejahtera: Mempercepat pengentasan kemiskinan dan pengurangan ketimpangan
2. Jatim Kerja: Memperluas lapangan kerja yang berkualitas
3. Jatim Akses: Memperkuat infrastruktur konektivitas antar wilayah dan instar aglomerasi yang berkualitas, modern, terpadu dan berkeadilan
4. Jatim Agro: Meningkatkan Kesejahteraan Petani, Peternak dan Nelayan
5. Jatim Cerdas: Memperkuat akses dan mutu Pendidikan yang berkualitas, merata dan berkeadilan
6. Jatim Sehat: Meningkatkan derajat Kesehatan Masyarakat yang berkualitas, merata, mudah diakses dan berkeadilan
7. Jatim Berkah Amanah: Memperkuat penyelenggaraan tata Kelola pemerintahan yang baik, bersih, efektif berdaya guna dan partisipatif
8. Jatim Harmoni: Menjaga terwujudnya Masyarakat yang harmonis dan inklusif
9. Jatim Lestari: Menjaga kelestarian lingkungan hidup dalam mewujudkan Pembangunan berkelanjutan

Arah kebijakan pembangunan di bidang pangan, peternakan, dan perikanan Kabupaten Jember selaras dengan visi Provinsi Jawa Timur. Dalam mendukung visi tersebut Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan berkomitmen untuk melaksanakan berbagai program strategis yang mendukung transformasi ekonomi daerah yang berkelanjutan, penguatan ketahanan pangan, serta pemberdayaan masyarakat petani, peternak, dan nelayan. Kebijakan ini juga berpedoman pada semangat Nawa Bhakti Satya, khususnya pada *Bhakti Jatim Agro* yang menekankan penguatan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan sebagai tulang punggung ekonomi rakyat. Melalui peningkatan produktivitas, pengembangan inovasi teknologi, dan pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan, Kabupaten Jember diarahkan untuk



menciptakan sistem pangan yang tangguh, usaha peternakan yang efisien, serta perikanan yang berdaya saing. Lalu pada *Bhakti Jatim Sejahtera* dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan petani, peternak, dan nelayan, serta pemerataan akses terhadap pangan yang aman, bergizi, dan terjangkau. Upaya ini juga mendukung misi Provinsi Jawa Timur dalam mewujudkan transformasi ekonomi berkelanjutan, memantapkan ketahanan sosial, budaya, dan ekologi, serta memperkuat pembangunan kewilayahan yang inklusif dan merata.

1. Telaahan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Tujuan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah “Meningkatnya Nilai Tambah Ekonomi” dengan indikator sasaran “Persentase Pertumbuhan PDRB Sub kategori Tanaman Pangan”, “Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Hortikultura” dan “Indeks Ketahanan Pangan” adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

- 1) Meningkatkan Ketahanan Pangan Masyarakat
- 2) Meningkatkan Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura
- 3) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan

Telaahan terhadap tujuan dan sasaran Renstra ini menjadi landasan penting dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember, khususnya dalam aspek penguatan sistem pangan. Arah kebijakan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur menitikberatkan pada peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian, penguatan ketahanan pangan masyarakat, serta peningkatan nilai tambah ekonomi sektor pertanian melalui hilirisasi dan inovasi teknologi pertanian. Upaya tersebut diharapkan mampu memperkuat



posisi Jawa Timur sebagai lumbung pangan nasional sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis agroindustri berkelanjutan.

Pelaksanaan urusan pangan yang menjadi kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember memiliki arah yang sejalan dan sinergis dengan kebijakan provinsi. Melalui optimalisasi peningkatan akses pangan yang aman dan bergizi diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan Masyarakat.

Tabel Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Ketahanan Pangan Masyarakat	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	Potensi sumber daya ternak dan lahan yang masih luas; dukungan program peningkatan populasi dan produktivitas ternak	Keterbatasan akses modal, teknologi, dan sarana produksi modern
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk hasil ternak	Tumbuhnya pelaku usaha kecil menengah sektor olahan hasil ternak; adanya dukungan promosi dan pelatihan kewirausahaan	Rendahnya kemampuan inovasi produk; belum meratanya fasilitas rantai dingin dan pemasaran
	Belum optimalnya produksi bibit komoditas peternakan unggul	Adanya lembaga pembibitan dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Jawa Timur	Keterbatasan kualitas genetik indukan dan infrastruktur pembibitan di



Sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Prov Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
			tingkat daerah
	Kurangnya sarana dan prasarana peternakan	Dukungan pemerintah terhadap pembangunan kandang komunal dan bantuan alat peternakan	Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemeliharaan fasilitas yang ada
	Belum optimalnya penggunaan pakan ternak lokal	Tersedianya bahan baku lokal potensial (limbah pertanian, hasil samping agroindustri) untuk pakan alternatif	Kurangnya inovasi formulasi pakan, rendahnya pengetahuan peternak tentang pakan berkualitas

2. Telaahan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Tujuan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah “Meningkatnya Pertumbuhan PDRB sub Kategori Peternakan” dengan indikator sasaran “Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Peternakan (PDRB ADHK)” adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

- 4) Meningkatkan nilai tambah komoditas dan produk peternakan
- 5) Meningkatkan akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah

Telaahan terhadap tujuan dan sasaran tersebut menjadi dasar penting dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember, khususnya dalam perumusan arah kebijakan dan strategi pembangunan subsektor peternakan di daerah. Telaahan ini dilakukan untuk memastikan



sinkronisasi dan harmonisasi kebijakan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten, agar program yang dijalankan memiliki keterpaduan dan saling mendukung dalam pencapaian sasaran pembangunan peternakan secara menyeluruh.

urusan peternakan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan memiliki arah yang sejalan dan sinergis dengan kebijakan provinsi. Program dan kegiatan yang dilaksanakan di tingkat daerah diarahkan untuk mendukung peningkatan nilai tambah komoditas unggulan peternakan, seperti sapi, ayam ras, dan kambing, serta pengembangan produk olahan hasil ternak yang berdaya saing.

Tabel Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dinas Peternakan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya nilai tambah komoditas dan produk peternakan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	Potensi sumber daya ternak dan lahan yang masih luas; dukungan program peningkatan populasi dan produktivitas ternak	Keterbatasan akses modal, teknologi, dan sarana produksi modern
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk hasil ternak	Tumbuhnya pelaku usaha kecil menengah sektor olahan hasil ternak; adanya dukungan promosi dan pelatihan kewirausahaan	Rendahnya kemampuan inovasi produk; belum meratanya fasilitas rantai dingin dan pemasaran



Sasaran Renstra Dinas Peternakan Prov. Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
	Belum optimalnya produksi bibit komoditas peternakan unggul	Adanya lembaga pembibitan dan Balai Inseminasi Buatan (BIB) di Jawa Timur	Keterbatasan kualitas genetik indukan dan infrastruktur pembibitan di tingkat daerah
	Kurangnya sarana dan prasarana peternakan	Dukungan pemerintah terhadap pembangunan kandang komunal dan bantuan alat peternakan	Keterbatasan anggaran dan belum optimalnya pemeliharaan fasilitas yang ada
	Belum optimalnya penggunaan pakan ternak lokal	Tersedianya bahan baku lokal potensial (limbah pertanian, hasil samping agroindustri) untuk pakan alternatif	Kurangnya inovasi formulasi pakan, rendahnya pengetahuan peternak tentang pakan berkualitas

3. Telaahan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Tujuan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2026 adalah “Meningkatnya nilai tambah ekonomi” dengan indikator sasaran “Persentase Pertumbuhan PDRB Sub Kategori Perikanan” adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

- 1) Meningkatkan daya saing sektor kelautan dan Perikanan
- 2) Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah



Telaahan terhadap tujuan dan sasaran tersebut menjadi pijakan penting dalam penyusunan Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember, sebagai bagian dari upaya mewujudkan sinkronisasi antara kebijakan pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten.

Keterpaduan ini juga memperhatikan arah kebijakan dari Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) serta Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, yang berfokus pada peningkatan produktivitas, nilai tambah, dan daya saing sektor perikanan, sekaligus memastikan tata kelola pemerintahan yang efektif dan berintegritas.

Sejalan dengan hal tersebut, urusan kelautan dan perikanan yang dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember memiliki arah dan sasaran yang sejajar serta saling mendukung dengan kebijakan di tingkat nasional dan provinsi.

Tabel Permasalahan Pelayanan berdasarkan Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
Meningkatnya daya saing sektor kelautan dan perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap	- Armada dan alat tangkap belum modern - Cuaca ekstrem dan biaya operasional tinggi - Akses permodalan terbatas	- Potensi sumber daya ikan melimpah - Dukungan sarpras dan kebijakan ekonomi biru - Kelembagaan nelayan mulai tumbuh



Sasaran Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan Prov Jawa Timur	Permasalahan PD terkait Sasaran Renstra Dinas Provinsi	Faktor	
		Penghambat	Pendukung
	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	- Terbatasnya benih dan pakan unggul - Penyakit ikan dan kualitas air menurun - Teknologi budidaya belum optimal	- Potensi lahan budidaya luas - Dukungan program budidaya berkelanjutan - Minat masyarakat terhadap usaha budidaya tinggi
	Belum optimalnya pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan	- Fasilitas pengolahan dan distribusi terbatas - Inovasi dan promosi produk masih rendah	- Bahan baku melimpah - Dukungan UMKM dan industrialisasi hasil perikanan - Permintaan pasar produk olahan meningkat
	Belum optimalnya Tingkat kelangsungan hidup benih	- Kualitas lingkungan dan manajemen pembenihan belum stabil	- Adanya Balai Benih Ikan yang menyediakan benih bermutu

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Wilayah adalah ruang yang merupakan kestauan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administrative dan/ atau aspek fungsional. Sedangkan kawasan adalah wilayah yang memiliki fungsi utama lindung dan budidaya.

Telaahan rencana tata ruang wilayah ditunjukan untuk mengidentifikasi implikasi rencana struktur dan pola



ruang terhadap kebutuhan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember. Dibandingkan dengan struktur dan pola ruang eksisting maka Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember dapat mengidentifikasi arah (geografis) pengembangan pelayanan, perkiraan kebutuhan pelayanan, dan prioritas wilayah pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang. Dikaitkan dengan indikasi program pemanfaatan ruang jangka menengah dalam RTRW, OPD dapat menyusun rancangan program beserta targetnya yang sesuai dengan RTRW.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember tahun 2015-2035. Kawasan peruntukan Perikanan adalah sebagai berikut:

1. Kawasan budidaya kolam air tawar berupa ikan lele, tawes, mujair, nila, udang galah, gurame, tombro, patin dan sidat tersebar diseluruh kecamatan;
2. Kawasan budidaya air payau berupa ikan bandeng, udang putih, udang windu dan vaname berada di kecamatan: Puger, Ambulu dan Gumukmas
3. Kawasan Minapadi berada di Kecamatan: Silo, Mayang, Rambipuji, Panti, Kalisat, Sumberjambe dan Ledokombo.
4. Pengembangan Pelabuhan Perikanan Pantai (PPP) berada di Kecamatan Puger.
5. Kawasan perikanan tangkap untuk ikan pelagis dan demersal meliputi kecamatan: Kencong, Puger, Ambulu, Tempurejo dan Gumukmas.

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor (1) tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”. Dengan demikian, dalam



rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang pangan, bidang pertanian khususnya sub sektor peternakan dan bidang kelautan dan perikanan, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bidang Kelautan dan Perikanan ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Pembangunan perikanan dengan pendekatan kawasan	- Penetapan pembangunan berbasis kawasan perikanan di dalam RTRW meliputi kawasan perikanan tangkap, perikanan budidaya dan pengolahan ikan serta kemudahan akses ijin usaha dari dinas terkait	- Belum optimalnya pembangunan kawasan pembangunan khusus perikanan yang telah ditetapkan di dalam dokumen RTRW - Masih belum sinkronnya lokasi pembangunan berbasis kawasan terutama kawasan perikanan budidaya (khususnya tambak udang) sehingga masih terjadi gesekan dengan masyarakat setempat terkait ijin usaha.



2.2.1.4 Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Kajian Lingkungan Hidup Strategis, yang selanjutnya disingkat KLHS adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. KLHS memuat kajian antara lain:

1. Kapasitas daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup untuk pembangunan;
2. Perkiraan mengenai dampak dan risiko lingkungan hidup;
3. Kinerja layanan/kasa ekosistem;
4. Efisiensi pemanfaatan sumber daya alam;
5. Tingkat kerentanan dan kapasitas adaptasi terhadap perubahan iklim; dan
6. Tingkat ketahanan dan potensi keanekaragaman hayati.

Hasil KLHS menjadi dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah terlampaui, maka:

1. Kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS; dan
2. Segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap



KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Bidang Peternakan ditinjau dari implikasi KLHS

No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Prevalensi ketidakcukupan konsumsi pangan (Prevalence of Undernourishment)	- Program diversifikasi pangan dan peningkatan akses pangan lokal bergizi. - Dukungan pemerintah terhadap ketahanan pangan rumah tangga.	- Ketimpangan distribusi pangan di wilayah terpencil. - Kurangnya pengetahuan tentang pola makan bergizi.
2.	Prevalensi dengan kerawanan pangan sedang atau berat, berdasarkan pada skala pengalaman kerawanan pangan	- Adanya cadangan pangan pemerintah daerah. - Program intervensi sosial dan bantuan pangan.	- Perubahan iklim yang memengaruhi produksi pertanian dan perikanan. - Infrastruktur logistik pangan yang belum merata.
3.	Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan Tingkat konsumsi ikan	- Peningkatan produksi dan distribusi ikan segar/olahan. - Sosialisasi “Gemarikan” dan edukasi	- Rendahnya literasi gizi dan kebiasaan makan masyarakat. - Akses masyarakat terhadap sumber pangan



No	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
		gizi Masyarakat - Dukungan terhadap UMKM pengolah hasil perikanan.	bergizi belum merata. - Persepsi sebagian masyarakat bahwa ikan sulit diolah atau berbau amis
4.	Nilai Tambah Pertanian dibagi jumlah tenaga kerja di sektor pertanian (rupiah per tenaga kerja)	- Inovasi teknologi pertanian dan perikanan (misal budidaya intensif, pakan mandiri). - Pelatihan peningkatan kapasitas SDM.	- Rendahnya produktivitas tenaga kerja akibat keterampilan terbatas. - Keterbatasan sarana prasarana produksi.

Penyelarasan antara Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sangat penting dalam mendukung pencapaian ketahanan pangan yang berkelanjutan di Kabupaten Jember. Dengan pengelolaan ruang yang efisien dan pengelolaan lingkungan yang ramah lingkungan, sektor ketahanan pangan dan peternakan di Kabupaten Jember dapat berkembang secara berkelanjutan, mengoptimalkan potensi lokal, dan meningkatkan kemandirian pangan daerah.

Faktor pendukung utama seperti potensi sumber daya alam, komitmen pemerintah daerah, dan keterlibatan masyarakat akan memperkuat upaya untuk mencapai tujuan ini. Namun, beberapa faktor penghambat seperti keterbatasan infrastruktur, ketidaksesuaian pengelolaan ruang, kurangnya koordinasi antar perangkat daerah, dan keterbatasan SDM perlu diatasi untuk memastikan implementasi yang efektif dari kebijakan RTRW dan KLHS.



Dengan koordinasi yang baik antara perangkat daerah, peningkatan kapasitas SDM, dan pengembangan infrastruktur, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember dapat memastikan tercapainya ketahanan pangan yang berkelanjutan dan mendukung keberlanjutan pembangunan daerah yang lebih baik.

2.2.2 Penentuan Isu-isu Strategis

Berdasarkan hasil analisis terhadap Visi Misi Kabupaten Jember, Renstra Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pertanian, Badan Pangan Nasional, Dinas Kelautan dan Perikanan dan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Jawa Timur, maka perlu menetapkan isu-isu strategis untuk mendapat perhatian dan penanganan secara serius melalui program dan kegiatan/sub kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan, sehingga Tujuan dalam resntra yaitu “Meningkatnya Ketahanan Pangan dan Potensi Perekonomian Sektor Peternakan dan Perikanan” dengan indikator Skor Pola Pangan Harapan dan Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan.

Keterkaitan antara permasalahan dengan isu strategis dapat dijelaskan pada tabel berikut:

Tabel 2.1 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan	Permasalahan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan	Isu KLHS yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan			Isu Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan
			Global	Nasional	Regional	
Ketahanan Pangan	Belum optimalnya Ketersediaan, ketercukupan konsumsi, dan keamanan pangan masyarakat	Ketahanan pangan dan gizi berkelanjutan	Krisis pangan dunia, perubahan iklim, system pangan berkelanjutan	Ketimpangan akses pangan, ketergantungan impor, dan ketersediaan pangan bergizi	Belum optimalnya produksi lokal, distribusi tidak merata dan perubahan iklim daerah memengaruhi produktivitas	Meningkatnya ketersediaan, ketercukupan kebutuhan konsumsi dan keamanan pangan masyarakat



Peternakan dan Kesehatan Hewan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas peternakan	Kesehatan masyarakat veteriner dan keamanan pangan asal hewan dan Pengelolaan limbah peternakan dan emisi gas rumah kaca (GRK)	Krisis protein hewani, perubahan iklim, tuntutan peternakan berkelanjutan	Produktivitas rendah, ketergantungan impor pakan & bibit, wabah penyakit	Pakan dan bibit terbatas kelembagaan peternak lemah, dan sarana minim	Meningkatnya produksi komoditas peternakan
Kelautan dan Perikanan	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan tangkap	Pengendalian penangkapan berlebih (overfishing)	IUU Fishing	(WPPNRI) mengalami eksploitasi berlebihan atau pemanfaatan yang melebihi kapasitasnya	Perubahan iklim	Meningkatnya Pertumbuhan produksi perikanan tangkap
	Belum optimalnya produksi dan produktivitas perikanan budidaya	Degradasi ekosistem perairan dan penurunan kualitas lingkungan budidaya dan Pemanfaatan sumber daya air dan lahan perikanan yang tidak berkelanjutan	Permintaan pasar meningkat untuk akuakultur berkelanjutan	Transformasi sector budidaya laut, tambak udang dan minapadi	Belum optimalnya pemanfaatan lahan budidaya dan sarana prasaran pendukung	Meningkatnya Pertumbuhan produksi perikanan budidaya
	Belum optimalnya daya saing pengolahan dan pemasaran produk kelautan dan perikanan dan Belum optimalnya mutu produk olahan hasil perikanan	Pengelolaan limbah industri pengolahan ikan	Tuntutan pasar terhadap jaminan mutu dan Traceability	Penekanan pada hilirisasi dan sertifikasi mutu	Akses UMKM terhadap sertifikasi masih rendah	Meningkatnya pertumbuhan produk olahan yang bermutu
	Belum optimalnya kinerja Perangkat Daerah		Pemerintahan berbasis data dan digitalisasi pelayanan	Reformasi Birokrasi dan Sakip	Keterbatasan Anggaran	Meningkatnya nilai akuntabilitas Sakip

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGIS DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu:

“Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju”

Dalam dokumen RPJMD 2025-2029, Visi tersebut dijabarkan kedalam 5 (lima) Misi untuk mewujudkannya, yaitu:

1. Mengentaskan Kemiskinan dan Perlindungan Sosial yang Merata
2. Mewujudkan SDM yang Religius, Unggul dan Setara
3. Membangun Birokrasi yang Profesional, Humanis dan Melayani Serta Penerapan Teknologi Informasi untuk Meningkatkan Inovasi Pelayanan Publik.
4. Mewujudkan Infrastruktur yang Berkualitas dan Penataan Kota yang Berbasis Pembangunan Berkelanjutan
5. Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan.

Dari 5 (lima) misi RPJMD tersebut diatas, yang relevan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember sebagai unsur pembantu kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan di bidang Pertanian sektor peternakan, bidang pangan dan bidang kelautan dan perikanan adalah misi ke 5 (lima) yaitu:

“Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan”

Atas misi ke 5 (lima) RPJMD tersebut ditetapkan Tujuan RPJMD yaitu:

“Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Merata”

Tujuan tersebut diatas dicapai melalui sasaran yang telah ditetapkan dalam RPJMD yaitu:

“Berkembangnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan dan Potensi Sektor Strategis lainnya”

“Meningkatnya Ketahanan Pangan”

Dengan indikator untuk urusan pemerintahan urusan pemerintahan di Bidang Kelautan dan Perikanan, Bidang Ketahanan Pangan dan Bidang Pertanian yaitu:

“Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan dan Perikanan”

“Pola Pangan Harapan”

Atas dasar misi ke 5 (lima), Tujuan dan sasaran RPJMD Pemerintah Kabupaten Jember dan dengan memperhatikan program prioritas Bupati tersebut, serta memperharhatikan tugas pokok dan fungsi, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember menetapkan Tujuan dalam Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember adalah”

“Meningkatnya Ketahanan Pangan Serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan dan Perikanan”

Dengan indikator “Skor Pola Pangan Harapan” dan “Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan.

Adapun sasaran strategis dari tujuan meliputi:

1. Meningkatkan Ketersediaan, Ketercukupan Kebutuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat
2. Meningkatkan Produksi Komoditas Peternakan
3. Meningkatkan Produksi Perikanan
4. Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan

Sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil (outcome/impact) dari satu atau beberapa program.

Target indikator kinerja sasaran strategis tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

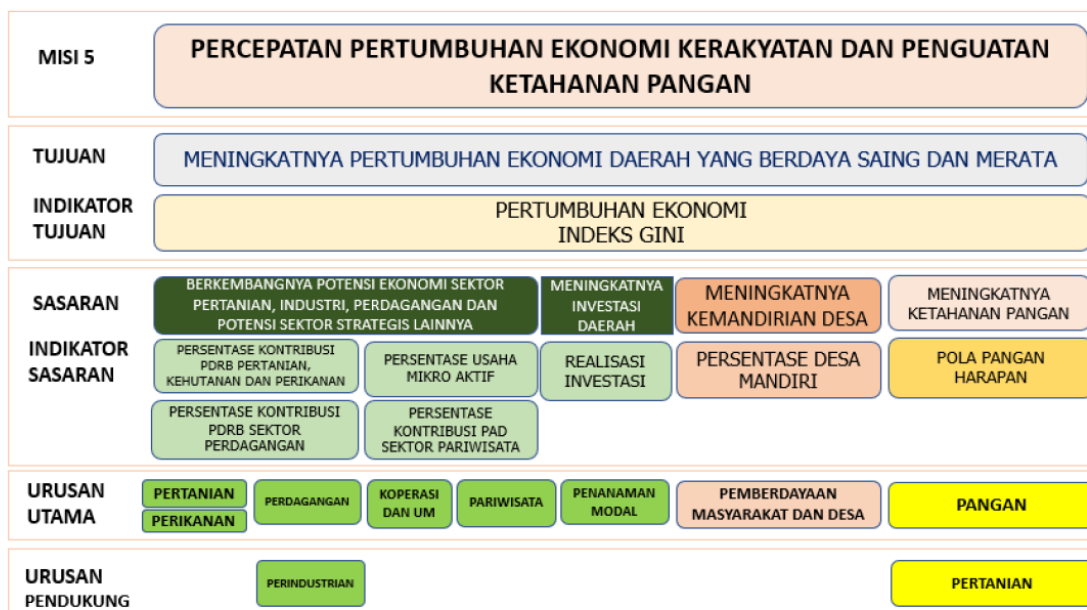


Tabel 3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN											
- Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya - Meningkatnya ketahanan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan, dan Perikanan		Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)	92,5	92,6	92,7	92,8	92,9	93	93,1	
			Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)	25,71	26,81	28,6	29,54	30,51	31,51	32,55	
		Meningkatnya Ketersediaan, Ketercukupan Kebutuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat	Prevalensi Ketidacukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))	9,84	9,62	9,23	8,85	8,47	8,08	7,7	
			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)	2	2,1	2,12	2,14	2,16	2,18	2,2	
		Meningkatnya Produksi Perikanan	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)	1,6	1,9	1,92	1,94	1,96	1,98	2	
			Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)	1,5	1,52	1,54	1,56	1,58	1,6	1,62	
		Meningkatnya Produksi Komoditas Peternakan	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan (%)	9,9	11,2	12,4	13,7	14,5	16,1	17,4	
		Meningkatnya Efektifitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	69,86	73	80	81	82	83	84	

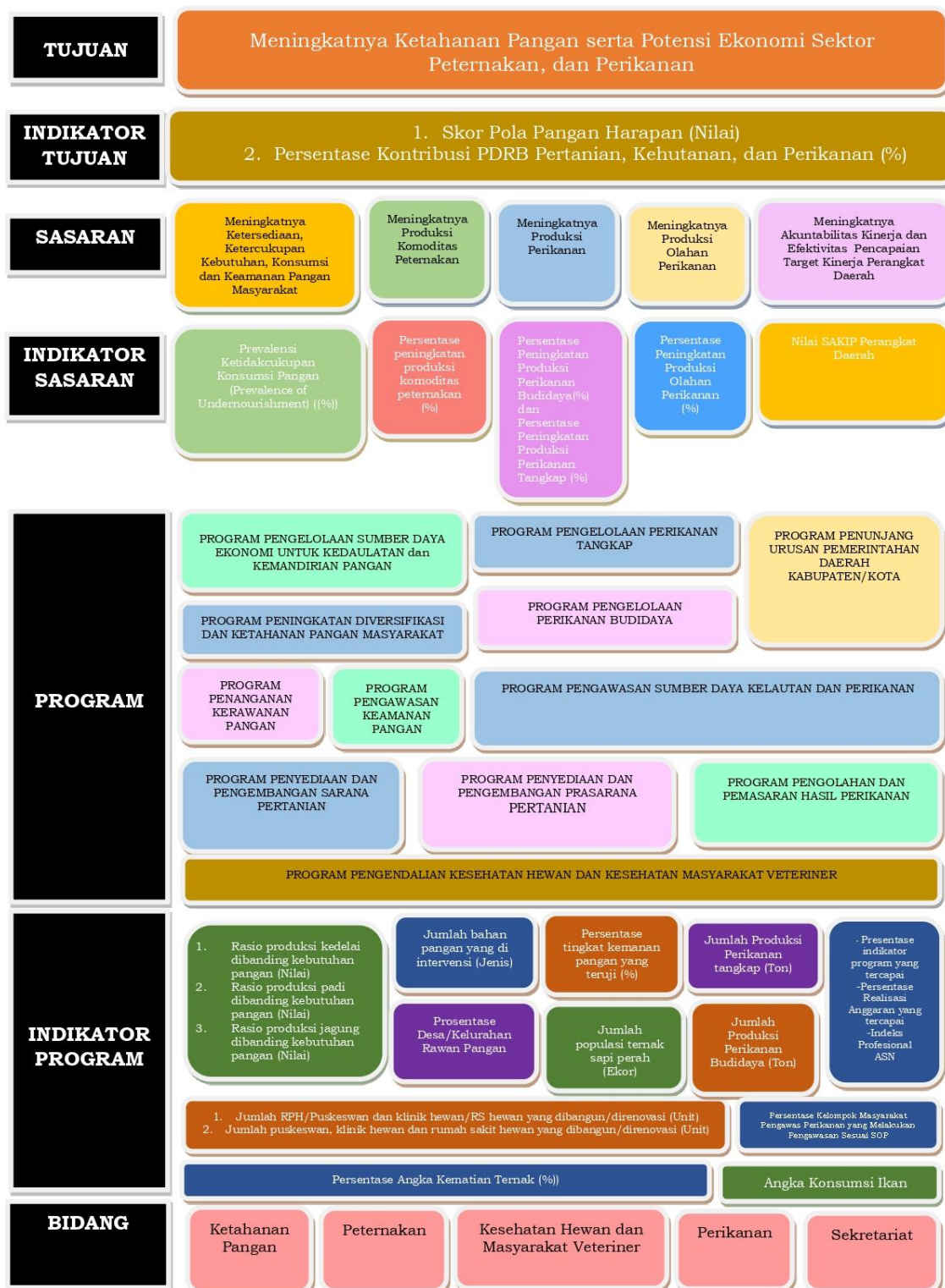


Gambar 3.1 Cascading Misi 5 RPJMD Kabupaten Jember 2025-2029





Gambar 3.2 Cascading Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember



3.2 Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember.

Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan (T-C.26.)

Visi : Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru yang Lebih Sejahtera dan Maju			
Misi : Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan dan Penguatan Ketahanan Pangan			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Ketahanan Pangan serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan dan Perikanan	Meningkatnya Produksi Perikanan	1. Mengoptimalkan produksi perikanan tangkap	1. Meningkatkan kualitas SDM dan modernisasi teknologi penangkapan ikan 2. Meningkatkan jumlah dan memperbesar



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
			kapasitas sarana tangkap 3. Meningkatkan modal usaha nelayan 4. Menambahakan pelabuhan perikanan di Kab. Jember 5. Meningkatkan kualitas hasil tangkapan
		2. Mengoptimalkan Produksi Perikanan Budidaya	1. Memperluas lahan budidaya, pakan mandiri dan penyediaan benih ikan unggul 2. Intensifikasi teknologi budidaya
	Meningkatkan Produksi Olahan Perikanan	1. Mengoptimalkan produksi olahan perikanan dan akses pasar	1. Meningkatkan diversifikasi produk olahan ikan dan bahan baku 2. Meningkatkan akses pemasaran produk olahan hasil produksi perikanan 3. Meningkatkan kualitas pengemasan secara higienis dan menarik
		2. Memfasilitasi proses penerbitan dan	1. Mengedukasi pelaku usaha perikanan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		penegakan peraturan perijinan usaha perikanan	mengenai perijinan usaha perikanan 2. Sosialisasi perda tentang perijinan
		3. Mengoptimalkan kompetensi pelaku usaha dibidang kelautan dan perikanan	1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan kelompok
	Meningkatnya Ketersediaan, Ketercukupan Kebutuhan, Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat	1. Penguatan Distribusi Pangan: Meningkatkan efisiensi distribusi pangan ke seluruh wilayah untuk memastikan pasokan yang merata. 2. Diversifikasi Pangan Lokal: Mengembangkan komoditas pangan lokal untuk mengurangi ketergantungan pada pangan impor. 3. Keamanan Pangan: Memperkuat pengawasan terhadap produk pangan untuk memastikan kualitas dan keamanan yang terjamin.	1. Penguatan Infrastruktur Pangan: Meningkatkan distribusi pangan secara merata ke seluruh daerah. 2. Diversifikasi Pangan Lokal: Mengembangkan dan mempromosikan konsumsi pangan lokal yang sehat dan bergizi. 3. Keamanan Pangan: Memperketat pengawasan pangan untuk memastikan kualitas dan keamanan pangan. 4. Pemanfaatan Teknologi Pertanian: Mendorong penggunaan teknologi ramah lingkungan



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		4. Peningkatan Pemahaman Pangan Sehat: Melakukan sosialisasi pola makan bergizi kepada masyarakat. 5. Pemanfaatan Teknologi Pertanian: Menggunakan teknologi tepat guna untuk meningkatkan hasil pertanian yang berkelanjutan.	untuk meningkatkan hasil pertanian.
	Meningkatkan Produksi Komoditas Peternakan	1. Penguatan SDM Peternak: Memberikan pelatihan kepada peternak untuk meningkatkan keterampilan dalam pemeliharaan ternak. 2. Peningkatan Pakan Ternak Lokal: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan pakan ternak dengan memanfaatkan sumber daya lokal. 3. Kesehatan Ternak:	1. Pemberdayaan Peternak: Meningkatkan kapasitas peternak melalui pelatihan dan penguatan kelembagaan. 2. Peningkatan Pakan Ternak: Mengembangkan sumber pakan ternak lokal yang berkualitas. 3. Kesehatan Ternak: Memastikan pengelolaan kesehatan ternak melalui vaksinasi dan pemantauan rutin.



Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		Meningkatkan penyuluhan kesehatan ternak dan vaksinasi untuk menjaga kualitas produk ternak. 4. Peningkatan Infrastruktur Peternakan: Meningkatkan fasilitas pengolahan dan distribusi hasil peternakan. 5. Pengelolaan Limbah Peternakan: Mengoptimalkan pemanfaatan limbah ternak menjadi produk yang ramah lingkungan	4. Peningkatan Infrastruktur Peternakan: Meningkatkan fasilitas pengolahan dan distribusi produk peternakan. 5. Pengelolaan Limbah Peternakan: Mengelola limbah peternakan secara ramah lingkungan, termasuk pemanfaatan untuk biogas atau pupuk organik



BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN DAN KINERJA PENYELANGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Kinerja, Indikator, Target dan Pagu Indikator Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember.



Tabel 4.1 Teknik Merumuskan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Resntra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
2.09.3.25.3.27.01.0000 - DINAS KETAHANAN PANGAN, PETERNAKAN DAN PERIKANAN							
- Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya - Meningkatkan ketahanan pangan	Meningkatnya Ketahanan Pangan serta Potensi Ekonomi Sektor Peternakan, dan Perikanan				Skor Pola Pangan Harapan (Nilai)		
					Persentase Kontribusi PDRB Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan (%)		
		Meningkatnya Ketersediaan, Ketercukupan Kebutuhan Konsumsi dan Keamanan Pangan Masyarakat			Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment) ((%))		
					Persentase Realisasi Anggaran (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
				Tersedianya penyusunan administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
					Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Terlaksananya penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	3.27.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	3.27.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Terlaksananya laporan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	
					Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	3.27.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan		Rasio produksi kedelai dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Rasio produksi padi dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
					Rasio produksi jagung dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN	
				Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya	
			meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat		Jumlah Bahan Pangan yang Diintervensi (Jenis)	2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	
				Jumlah Stabilisasi harga pokok komoditas pangan di tingkat konsumen dan produsen	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	
					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
					Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis	
					Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota	
				Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	
				Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	
					Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal	
			Meningkatnya penanganan kerawanan pangan		Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan (%)	2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	
				Terlaksananya identifikasi daerah rentan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan	
					Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	
				Tersedianya lokasi penanggulangan kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan		Persentase tingkat keamanan pangan yang teruji (%)	2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN	
				Jumlah Komoditas PSAT yang diawasi	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
					Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	
			Meningkatnya populasi ternak (ekor)		Jumlah populasi ternak sapi potong (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak sapi perah (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak kambing (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak domba (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak ayam buras (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak ayam petelur (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
					Jumlah populasi ternak ayam ras pedaging (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah populasi ternak itik (Ekor)	3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	
				Tersedianya unit sarana peternakan yang diawasi	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	
					Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	
					Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	
				Tersedianya komoditas ternak prioritas yang dikembangkan di Kabupaten Jember	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman	
					Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG Hewan	
				Tersedianya benih/bibit ternak (straw) yang layak edar dan jenis tanaman pakan yang dikembangkan di Kabupaten Jember	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	
				Tersedianya unit usaha obat hewan yang diawasi	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer	
					Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan	
				Terlaksananya pengawasan bibit ternak dan pakan ternak di Kabupaten Jember	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	3.27.02.2.05.0002 - Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	
					Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	
					Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak	
					Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak	
			Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian		Jumlah RPH/Puskesmas dan klinik hewan/RS hewan yang dibangun/direnovasi (Unit)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya sarana peternakan yang dibangun dan direhabilitasi dalam waktu 1 tahun	Jumlah puskesmas, klinik hewan dan rumah sakit hewan yang dibangun/direnovasi (Unit)	3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian	
					Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0011 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	
					Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	3.27.03.2.02.0013 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	
					Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	
					Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan	
					Menurunnya Angka Kematian Ternak	3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Menurunnya Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
					Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	
				Terlaksananya pengawasan Pemasukan & Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner	
				Terlaksananya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium	
				Terlaksananya Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	
				Tersedianya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Terlaksananya Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	
					Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)	
		Meningkatnya Produksi Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya (%)		
					Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap (%)		
			Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap		Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Angka)	3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP	
				Meningkatnya Produksi Ikan di PUD	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	
					Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	
					Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap	
				Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	
					Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	
				Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
					Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	
				Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	
					Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	
					Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	
					Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	
			Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya		Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Angka)	3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	
				Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	
					Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	
					Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	
					Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat	
					Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	
			Meningkatnya efektivitas kelompok masyarakat pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)		Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang Melakukan Pengawasan Sesuai SOP (%)	3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN	
				Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota	
					Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota	
					Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan	
					Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	3.25.05.2.01.0010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota	
					Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan	
		Meningkatnya Produksi Olahan Perikanan			Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan (%)		
			Meningkatnya Konsumsi ikan Oleh Masyarakat		Angka Konsumsi Ikan (Angka)	3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda Daftar	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	
					Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko	
				Terlaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	
					Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	
				Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota	
					Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	



4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, dan Pendanaan

Rencana Program dan Kegiatan adalah cara untuk melaksanakan Tujuan dan Sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksud sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan guna mencapai sasaran tertentu. Dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan melakukan 11 (sebelas) Program utama dan 1 (satu) program Penunjang sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan
2. Program Peningkatan diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan
5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian
6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian
7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner
8. Program Pengelolaan Perikanan Tangkap
9. Program Pengelolaan Perikanan Budidaya
10. Program Pengawasan Sumberdaya Kelautan dan Perikanan
11. Program Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan
12. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

Berikut ini adalah Tabel 4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan dan Perikanan Kabupaten Jember



Tabel 4.2 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN				1.355.067.550		1.417.900.400,00		2.795.000.000,00		2.799.200.000,00		2.803.400.000,00		2.807.300.000,00
2.09.02 - PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN dan KEMANDIRIAN PANGAN				0		0,00		1.500.000.000,00		1.500.100.000,00		1.500.200.000,00		1.500.300.000,00
Meningkatnya pengelolaan sumber daya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Rasio produksi padi dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	2,64	2,67	0	2,67	0,00	2,68	1.500.000.000,00	2,69	1.500.100.000,00	2,69	1.500.200.000,00	2,69	1.500.300.000,00
	Rasio produksi kedelai dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	0,4	0,43		0,43		0,44		0,45		0,45		0,45	
	Rasio produksi jagung dibanding kebutuhan pangan (Nilai)	15,7	15,73		15,73		15,74		15,75		15,75		15,75	
2.09.02.2.01 - Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		1.500.000.000,00		1.500.100.000,00		1.500.200.000,00		1.500.300.000,00
Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Yang Tersedia	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan yang Tersedia (Unit)	2	0	0	0	0,00	6	1.500.000.000,00	8	1.500.100.000,00	10	1.500.200.000,00	12	1.500.300.000,00
2.09.02.2.01.0003 - Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya				0		0,00		1.500.000.000,00		1.500.100.000,00		1.500.200.000,00		1.500.300.000,00
Tersedianya Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan	Jumlah Infrastruktur Pendukung Kemandirian	2	0	0	0	0,00	6	1.500.000.000,00	8	1.500.100.000,00	10	1.500.200.000,00	12	1.500.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Pangan yang Tersedia (Unit)													
2.09.03 - PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT				1,321,838,500		1.351.087.100,00		1.210.000.000,00		1.212.800.000,00		1.215.600.000,00		1.218.100.000,00
meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Jumlah Bahan Pangan yang Diintervensi (Jenis)	10	12	1,321,838,500	12	1.351.087.100,00	13	1.210.000.000,00	14	1.212.800.000,00	15	1.215.600.000,00	16	1.218.100.000,00
2.09.03.2.01 - Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan				723,591,000		221.136.000,00		235.000.000,00		237.000.000,00		239.000.000,00		240.700.000,00
Jumlah Stabilisasi harga pokok komoditas pangan di tingkat konsumen dan produsen	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	0	-	0	221.136.000,00	2	235.000.000,00	2	237.000.000,00	2	239.000.000,00	2	240.700.000,00
	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	90		90		100		100		100		100	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
2.09.03.2.01.0007 - Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga				-		34.056.000,00		20.000.000,00		20.500.000,00		21.000.000,00		21.500.000,00
Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga (Keluarga)	100	90	-	90	34.056.000,00	100	20.000.000,00	100	20.500.000,00	100	21.000.000,00	100	21.500.000,00
2.09.03.2.01.0012 - Penyediaan Informasi Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota				0		0,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00
Tersedianya informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen Wilayah Kabupaten/Kota	Informasi harga pangan tingkat Produsen dan Konsumen wilayah Kabupaten/Kota (Laporan)	2	0	0	0	0,00	2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	6.000.000,00	2	6.500.000,00
2.09.03.2.01.0014 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan Pokok Strategis				723,591,000		187.080.000,00		200.000.000,00		200.500.000,00		201.000.000,00		201.200.000,00
Terlaksananya pemantauan stok, pasokan dan harga pangan Pokok Strategis	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi pemantauan stok pangan, pasokan pangan dan harga pangan Pokok Strategis (Laporan)	1	1	723,591,000	1	187.080.000,00	1	200.000.000,00	1	200.500.000,00	1	201.000.000,00	1	201.200.000,00
2.09.03.2.01.0020 - Penyusunan Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota				0		0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00
Tersedianya data proyeksi neraca pangan Wilayah Kabupaten/Kota	Data Proyeksi Neraca Pangan Wilayah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.03.2.02 - Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota				500,015,500		999.999.000,00		900.000.000,00		900.500.000,00		901.000.000,00		901.500.000,00
Jumlah cadangan pangan pemerintah Kabupaten yang dikelola	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	25	30	500,015,500	30	999.999.000,00	30	900.000.000,00	30	900.500.000,00	30	901.000.000,00	30	901.500.000,00
2.09.03.2.02.0003 - Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota				500,015,500		999.999.000,00		900.000.000,00		900.500.000,00		901.000.000,00		901.500.000,00
Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota (Ton)	25	30	500,015,500	30	999.999.000,00	30	900.000.000,00	30	900.500.000,00	30	901.000.000,00	30	901.500.000,00
2.09.03.2.04 - Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi				98,232,000		129.952.100,00		75.000.000,00		75.300.000,00		75.600.000,00		75.900.000,00
Prosentase Angka Kecukupan Energi (AKE) dan Angka Kecukupan Protein (AKP)	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	0	98,232,000	0	129.952.100,00	1	75.000.000,00	1	75.300.000,00	1	75.600.000,00	1	75.900.000,00
	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Panganekaragama n Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2	
2.09.03.2.04.0001 - Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Terlaksananya Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun	Target Konsumsi Pangan Per Kapita Per Tahun (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.03.2.04.0002 - Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal				98,232,000		129.952.100,00		70.000.000,00		70.200.000,00		70.400.000,00		70.600.000,00
Terlaksananya Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal	Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berkas Sumber Daya Lokal (Laporan)	2	2	98,232,000	2	129.952.100,00	2	70.000.000,00	2	70.200.000,00	2	70.400.000,00	2	70.600.000,00
2.09.04 - PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN				7,682,000		24.880.000,00		35.000.000,00		35.300.000,00		35.600.000,00		35.900.000,00
Meningkatnya penanganan kerawanan pangan	Prosentase Desa/Kelurahan Rawan Pangan (%)	14	14	7,682,000	14	24.880.000,00	13	35.000.000,00	12	35.300.000,00	12	35.600.000,00	11	35.900.000,00
2.09.04.2.01 - Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan				-		9.999.800,00		20.000.000,00		20.200.000,00		20.400.000,00		20.600.000,00
Jumlah dentifikasi daerah rentan rawan pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	-	1	9.999.800,00	1	20.000.000,00	1	20.200.000,00	1	20.400.000,00	1	20.600.000,00
2.09.04.2.01.0001 - Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan				-		9.999.800,00		20.000.000,00		20.200.000,00		20.400.000,00		20.600.000,00
Tersusunnya Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan	Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan (Dokumen)	1	1	-	1	9.999.800,00	1	20.000.000,00	1	20.200.000,00	1	20.400.000,00	1	20.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.04.2.02 - Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota				7,682,000		14.880.200,00		15.000.000,00		15.100.000,00		15.200.000,00		15.300.000,00
Jumlah lokasi penganggulangan kerawanan pangan	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	7,682,000	1	14.880.200,00	1	15.000.000,00	1	15.100.000,00	1	15.200.000,00	1	15.300.000,00
2.09.04.2.02.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi Kabupaten/Kota				7,682,000		14.880.200,00		15.000.000,00		15.100.000,00		15.200.000,00		15.300.000,00
Terlaksananya koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota	Jumlah koordinasi dan sinkronisasi penanganan kerawanan pangan dan gizi kabupaten/kota (Laporan)	1	1	7,682,000	1	14.880.200,00	1	15.000.000,00	1	15.100.000,00	1	15.200.000,00	1	15.300.000,00
2.09.05 - PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN				25,547,050		41.933.300,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00
Meningkatnya pengawasan mutu dan keamanan pangan	Persentase tingkat kemanan pangan yang teruji (%)	100	100	25,547,050	100	41.933.300,00	100	50.000.000,00	100	51.000.000,00	100	52.000.000,00	100	53.000.000,00
2.09.05.2.01 - Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota				25,547,050		41.933.300,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		53.000.000,00
Jumlah Komoditas PSAT yang diawasi	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	0	25,547,050	0	41.933.300,00	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	52.000.000,00	2	53.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	0		0		15		20		22		25	
	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	10	10		10		12		15		18		20	
2.09.05.2.01.0004 - Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00
Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	Jumlah Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	10	0	0	0	0,00	15	5.000.000,00	20	5.200.000,00	22	5.400.000,00	25	5.600.000,00
2.09.05.2.01.0006 - Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan				25,547,050		41.933.300,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00
Penerbitan Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan	Jumlah Rekomendasi Perizinan keamanan pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	10	10	25,547,050	10	41.933.300,00	12	5.000.000,00	15	5.200.000,00	18	5.400.000,00	20	5.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
2.09.05.2.01.0007 - Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00
Tersedianya sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota	Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.400.000,00	1	5.600.000,00
2.09.05.2.01.0008 - Koordinasi dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0		0,00		30.000.000,00		30.200.000,00		30.400.000,00		30.600.000,00
Terlaksananya koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah pelaksanaan koordinasi, dan sinkronisasi keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Laporan)	1	0	0	0	0,00	2	30.000.000,00	2	30.200.000,00	2	30.400.000,00	2	30.600.000,00
2.09.05.2.01.0009 - Penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan				0		0,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.600.000,00
Tersedianya dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan	Jumlah dokumen penguatan kelembagaan pengawas keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.200.000,00	1	5.400.000,00	1	5.600.000,00
3.25 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN				1.964.135.100		1.785.654.700,00		1.574.000.000,00		1.584.100.000,00		1.615.300.000,00		1.624.900.000,00
3.25.03 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP				859.580.700		618.834.500,00		650.000.000,00		651.400.000,00		674.400.000,00		675.800.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Produksi Perikanan Tangkap	Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Angka)	14.021	15.283	859.580.700	16.658	618.834.500,00	18.158	650.000.000,00	19.792	651.400.000,00	21.573	674.400.000,00	23.515	675.800.000,00
3.25.03.2.01 - Pengelolaan Penangkapan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				309.979.400		146.433.000,00		110.000.000,00		110.300.000,00		130.400.000,00		130.700.000,00
Meningkatnya Produksi Ikan di PUD	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1	0	309.979.400	0	146.433.000,00	1	110.000.000,00	1	110.300.000,00	1	130.400.000,00	1	130.700.000,00
	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	1	10		10		10		10		10		10	
	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
3.25.03.2.01.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan				309.979.400		47.140.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Sumber Daya Ikan di Perairan Darat dalam Satu Kabupaten/Kota yang Tersedia (Dokumen)	1	1	309.979.400	1	47.140.000,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00
3.25.03.2.01.0002 - Penyediaan Prasarana Usaha Perikanan Tangkap				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Prasarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Prasarana Usaha Perikanan Tangkap yang Tersedia (Unit)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00
3.25.03.2.01.0004 - Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap				0		99.293.000,00		100.000.000,00		100.100.000,00		120.000.000,00		120.100.000,00
Tersedianya Sarana Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah Sarana Usaha Perikanan Tangkap yang Terjamin dan Tersedia (Unit)	1	10	0	10	99.293.000,00	10	100.000.000,00	10	100.100.000,00	10	120.000.000,00	10	120.100.000,00
3.25.03.2.02 - Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota				535.821.300		427.398.500,00		525.000.000,00		525.400.000,00		527.600.000,00		528.000.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	1	5	535.821.300	5	427.398.500,00	5	525.000.000,00	5	525.400.000,00	5	527.600.000,00	5	528.000.000,00
	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	998	1.500		1.500		1.500		1.500		1.250		1.250	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1	5		5		5		5		5		5	
3.25.03.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil				467.206.600		377.400.000,00		510.000.000,00		510.100.000,00		512.000.000,00		512.100.000,00
Meningkatnya Kapasitas Nelayan Kecil	Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya (Orang)	998	1.500	467.206.600	1.500	377.400.000,00	1.500	510.000.000,00	1.500	510.100.000,00	1.250	512.000.000,00	1.250	512.100.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.03.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil				68.614.700		34.993.500,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Terlaksananya Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil	Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaannya (Kelompok)	1	5	68.614.700	5	34.993.500,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	5	5.200.000,00	5	5.300.000,00
3.25.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitas Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0		15.005.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Terlaksananya Penyaluran Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha kepada Unit Usaha	Jumlah Unit Usaha yang Difasilitasi Penyaluran Bantuan Pen Danaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha (Unit Usaha)	1	5	0	5	15.005.000,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	5	5.200.000,00	5	5.300.000,00
3.25.03.2.02.0004 - Penyediaan Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil	Jumlah Sarana dan Prasarana Pemberdayaan Usaha Nelayan Skala Kecil (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	5	5.200.000,00	5	5.300.000,00
3.25.03.2.03 - Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				13.780.000		45.003.000,00		10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.600.000,00
Terlaksananya Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	2	13.780.000	2	45.003.000,00	2	10.000.000,00	3	10.200.000,00	3	10.400.000,00	3	10.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	4		4		4		4		4		4	
3.25.03.2.03.0001 - Penetapan Prosedur Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0		15.000.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Ditetapkannya SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah SOP Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Dokumen)	1	2	0	2	15.000.000,00	2	5.000.000,00	3	5.100.000,00	3	5.200.000,00	3	5.300.000,00
3.25.03.2.03.0002 - Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				0		30.003.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tersedianya Layanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI) (Layanan)	1	4	0	4	30.003.000,00	4	5.000.000,00	4	5.100.000,00	4	5.200.000,00	4	5.300.000,00
3.25.03.2.04 - Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		5.000.000,00		5.500.000,00		6.000.000,00		6.500.000,00
Terlaksananya Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.500.000,00	1	6.000.000,00	1	6.500.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	1	0		0		10		10		10		10	
	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	1	0		0		10		10		10		10	
	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	1	0		0		50		50		50		50	
3.25.03.2.04.0001 - Penetapan Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Ditetapkannya Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Persyaratan dan Prosedur Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Perikanan Tangkap yang Menjadi Kewenangan Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.25.03.2.04.0002 - Pelayanan Penerbitan Tanda Daftar Kapal Perikanan Berukuran sampai dengan 10 GT				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Diterbitkannya Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan	Jumlah Rekomendasi Tanda Daftar Kapal Perikanan (Rekomendasi)	1	0	0	0	0,00	50	1.000.000,00	50	1.100.000,00	50	1.200.000,00	50	1.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.03.2.04.0003 - Penerbitan rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Diterbitkannya rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP)	Jumlah rekomendasi Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) yang diterbitkan (Rekomendasi)	1	0	0	0	0,00	10	1.000.000,00	10	1.100.000,00	10	1.200.000,00	10	1.300.000,00
3.25.03.2.04.0004 - Penerbitan rekomendasi izin usaha perikanan tangkap				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Diterbitkannya rekomendasi izin usaha perikanan tangkap	Jumlah rekomendasi izin usaha yang diterbitkan (Rekomendasi)	1	0	0	0	0,00	10	1.000.000,00	10	1.100.000,00	10	1.200.000,00	10	1.300.000,00
3.25.03.2.04.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Perikanan Tangkap	Jumlah data dan informasi perizinan usaha perikanan tangkap yang tersedia (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.25.04 - PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA				783.356.000		551.280.700,00		570.000.000,00		576.600.000,00		583.200.000,00		589.800.000,00
Meningkatnya Produksi Perikanan Budidaya	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Angka)	15.787	16.418	783.356.000	17.075	551.280.700,00	17.758	570.000.000,00	18.469	576.600.000,00	19.207	583.200.000,00	19.976	589.800.000,00
3.25.04.2.02 - Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil				36.360.600		53.350.000,00		54.000.000,00		59.400.000,00		64.800.000,00		70.200.000,00
Meningkatnya Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	1	0	36.360.600	0	53.350.000,00	5	54.000.000,00	5	59.400.000,00	5	64.800.000,00	5	70.200.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	5		5		5		5		5		5	
	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	1	0		0		5		5		5		5	
3.25.04.2.02.0001 - Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil				0		0,00		10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.600.000,00
Terlaksananya Pengembangan Kapasitas Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pengembangan Kapasitas (Kelompok)	1	0	0	0	0,00	5	10.000.000,00	5	10.200.000,00	5	10.400.000,00	5	10.600.000,00
3.25.04.2.02.0002 - Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil				0		0,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan (Kelompok)	1	0	0	0	0,00	5	2.000.000,00	5	2.100.000,00	5	2.200.000,00	5	2.300.000,00
3.25.04.2.02.0003 - Pelaksanaan Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha				0		0,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00
Terlaksananya Fasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usaha	Jumlah Kelompok Usaha yang terfasilitasi Bantuan Pendanaan, Bantuan Pembiayaan, Kemitraan Usahanya (Kelompok)	1	0	0	0	0,00	5	2.000.000,00	5	2.100.000,00	5	2.200.000,00	5	2.300.000,00
3.25.04.2.02.0004 - Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				36.360.600		53.350.000,00		40.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00		55.000.000,00
Terpenuhinya Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan (Kelompok)	1	5	36.360.600	5	53.350.000,00	5	40.000.000,00	5	45.000.000,00	5	50.000.000,00	5	55.000.000,00
3.25.04.2.04 - Pengelolaan Pembudidayaan Ikan				746.995.400		497.930.700,00		516.000.000,00		517.200.000,00		518.400.000,00		519.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	746.995.400	0	497.930.700,00	1	516.000.000,00	1	517.200.000,00	1	518.400.000,00	1	519.600.000,00
	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	2		2		2		2		2		2	
	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
3.25.04.2.04.0001 - Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		20.000.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tersedianya Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	1	0	1	20.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00
3.25.04.2.04.0002 - Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				21.860.000		177.870.000,00		200.000.000,00		200.100.000,00		200.200.000,00		200.300.000,00
Tersedianya Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	2	21.860.000	2	177.870.000,00	2	200.000.000,00	2	200.100.000,00	2	200.200.000,00	2	200.300.000,00
3.25.04.2.04.0004 - Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan	Jumlah Hasil Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Teruji Melalui Pengelolaan Kesehatan Ikan (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.25.04.2.04.0008 - Monitoring Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terkelolanya Kesehatan Ikan dan Lingkungan Budidaya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Dokumen hasil pelaksanaan monitoring kesehatan ikan dan lingkungan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.25.04.2.04.0009 - Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				725.135.400		300.060.700,00		305.000.000,00		305.500.000,00		306.000.000,00		306.500.000,00
Tersedianya Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Unit)	1	12	725.135.400	12	300.060.700,00	12	305.000.000,00	12	305.500.000,00	12	306.000.000,00	12	306.500.000,00
3.25.04.2.04.0010 - Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				0		0,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00
Terbinanya Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	2.000.000,00	5	2.100.000,00	5	2.200.000,00	5	2.300.000,00
3.25.04.2.04.0011 - Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Terlaksananya Perencanaan, dan Pengembangan Pemanfaatan Air untuk Pembudidayaan Ikan di Darat bagi Pembudidaya Ikan	Jumlah Unit Usaha Pembudidayaan Ikan yang Memanfaatkan Air untuk Pembudidayaan Ikan (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	1.000.000,00	5	1.100.000,00	5	1.200.000,00	5	1.300.000,00
3.25.04.2.04.0013 - Penyediaan Sarana Prasarana Unit Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Penyediaan Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	Jumlah Sarana Prasarana unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang tersedia (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	1.000.000,00	5	1.100.000,00	5	1.200.000,00	5	1.300.000,00
3.25.05 - PROGRAM PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN				0		79.403.000,00		40.000.000,00		40.600.000,00		41.200.000,00		41.800.000,00
Meningkatnya efektivitas kelompok masyarakat pengawas perikanan dalam melaksanakan pengawasan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP)	Persentase Kelompok Masyarakat Pengawas Perikanan yang Melakukan Pengawasan Sesuai SOP (%)	5	20	0	20	79.403.000,00	40	40.000.000,00	60	40.600.000,00	80	41.200.000,00	100	41.800.000,00
3.25.05.2.01 - Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan Dalam Kabupaten/Kota				0		79.403.000,00		40.000.000,00		40.600.000,00		41.200.000,00		41.800.000,00
Terlaksananya Pengawasan Sumber Daya Perikanan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	1	1	0	1	79.403.000,00	1	40.000.000,00	1	40.600.000,00	1	41.200.000,00	1	41.800.000,00
	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	5		5		5		5		5		5	
	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	6		6		6		6		6		6	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	10		10		10		10		10		10	
	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	1	3		3		3		3		3		3	
3.25.05.2.01.0004 - Pengawasan usaha pembudidayaan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0		16.000.000,00		15.000.000,00		15.100.000,00		15.200.000,00		15.300.000,00
Terawasinya usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota	Jumlah pelaku usaha pembudidayaan ikan yang diperiksa kepatuhannya sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	6	0	6	16.000.000,00	6	15.000.000,00	6	15.100.000,00	6	15.200.000,00	6	15.300.000,00
3.25.05.2.01.0006 - Pengawasan usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0		16.000.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota yang diawasi	Jumlah pelaku usaha pemasaran hasil perikanan dan/atau usaha pengolahan hasil perikanan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	5	0	5	16.000.000,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	5	5.200.000,00	5	5.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.05.2.01.0007 - Pengawasan usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota				0		16.000.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Usaha Penangkapan Ikan dan/atau Usaha Pengangkutan Ikan di Wilayah Sungai, Danau, Waduk, Rawa, dan Genangan Air Lainnya yang Dapat Diusahakan dalam Kabupaten/Kota Yang Diawasi	Jumlah pelaku usaha penangkapan ikan dan/atau usaha pengangkutan ikan sesuai kewenangan kabupaten/kota (Pelaku Usaha)	1	10	0	10	16.000.000,00	10	5.000.000,00	10	5.100.000,00	10	5.200.000,00	10	5.300.000,00
3.25.05.2.01.0009 - Pembentukan Sumber Daya Manusia Pengawasan sumber daya perikanan				0		16.363.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengawasan Sumber daya perikanan yang dibentuk (Orang)	1	3	0	3	16.363.000,00	3	5.000.000,00	3	5.100.000,00	3	5.200.000,00	3	5.300.000,00
3.25.05.2.01.0010 - Penanganan perkara sanksi administratif bidang perikanan izin kabupaten/kota				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani	Jumlah perkara sanksi administratif bidang perikanan yang memiliki izin kabupaten/kota yang ditangani (Perkara)	1	0	0	0	0,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00
3.25.05.2.01.0011 - Pembangunan Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan				0		15.040.000,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun	Jumlah Prasarana Pengawasan Sumber Daya Perikanan yang dibangun (Unit)	1	1	0	1	15.040.000,00	1	5.000.000,00	1	5.100.000,00	1	5.200.000,00	1	5.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.06 - PROGRAM PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN				321.198.400		536.136.500,00		314.000.000,00		315.500.000,00		316.500.000,00		317.500.000,00
Meningkatnya Konsumsi ikan Oleh Masyarakat	Angka Konsumsi ikan (Angka)	19,04	19,05	321.198.400	19,06	536.136.500,00	19,07	314.000.000,00	19,08	315.500.000,00	19,09	316.500.000,00	20	317.500.000,00
3.25.06.2.01 - Penerbitan Tanda Daftar Usaha Pengolahan Hasil Perikanan bagi Usaha Skala Mikro dan Kecil				0		16.000.000,00		4.000.000,00		4.300.000,00		4.600.000,00		4.900.000,00
Meningkatnya Pelaku Usaha Pengolahan Hasil Perikanan yang memiliki Tanda Daftar	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	0	1	16.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.300.000,00	1	4.600.000,00	1	4.900.000,00
	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	1	0		0		2		2		2		2	
	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	1	0		0		2		2		2		2	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.25.06.2.01.0003 - Penerbitan Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Diterbitkannya Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan	Jumlah Rekomendasi Perizinan Berusaha Penunjang Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan (Rekomendasi)	1	0	0	0	0,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00
3.25.06.2.01.0004 - Pelaksanaan verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko				0		0,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Terlaksananya verifikasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko	Jumlah rekomendasi perizinan berusaha sesuai dengan standar usaha bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan tingkat risiko (Rekomendasi)	1	0	0	0	0,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00
3.25.06.2.01.0005 - Penyediaan Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota berdasarkan skala usaha dan risiko				0		16.000.000,00		2.000.000,00		2.100.000,00		2.200.000,00		2.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko	Jumlah Data dan Informasi Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan berdasarkan skala usaha dan risiko (Dokumen)	1	1	0	1	16.000.000,00	1	2.000.000,00	1	2.100.000,00	1	2.200.000,00	1	2.300.000,00
3.25.06.2.02 - Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tertaksananya Pembinaan Mutu dan Keamanan Hasil Perikanan bagi Usaha Pengolahan dan Pemasaran Skala Mikro dan Kecil	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1	0	0	0	0,00	3	5.000.000,00	3	5.100.000,00	3	5.200.000,00	3	5.300.000,00
3.25.06.2.02.0002 - Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko				0		0,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko	Jumlah Unit Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan yang mendapatkan pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko (Unit Usaha)	1	0	0	0	0,00	3	5.000.000,00	3	5.100.000,00	3	5.200.000,00	3	5.300.000,00
3.25.06.2.03 - Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/ Kota				321.198.400		520.136.500,00		305.000.000,00		306.100.000,00		306.700.000,00		307.300.000,00
Meningkatnya Penyediaan dan Penyaluran Bahan Baku Industri Pengolahan Ikan	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota (Ton)	286	301	321.198.400	5.000	520.136.500,00	5.060	305.000.000,00	5.120	306.100.000,00	5.181	306.700.000,00	5.243	307.300.000,00
	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	1	5		5		5		5		5		5	
3.25.06.2.03.0001 - Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				227.562.100		400.000.000,00		300.000.000,00		301.000.000,00		301.500.000,00		302.000.000,00
Meningkatnya Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Peningkatan Ketersediaan Ikan untuk Konsumsi dan Usaha Pengolahan Dalam 1 (Satu) Daerah	286	301	227.562.100	5.000	400.000.000,00	5.060	300.000.000,00	5.120	301.000.000,00	5.181	301.500.000,00	5.243	302.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Kabupaten/Kota (Ton)													
3.25.06.2.03.0002 - Pemberian Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				93.636.300		120.136.500,00		5.000.000,00		5.100.000,00		5.200.000,00		5.300.000,00
Tersedianya Fasilitas bagi Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Skala Mikro dan Kecil dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Terfasilitasi (Pelaku Usaha)	1	5	93.636.300	5	120.136.500,00	5	5.000.000,00	5	5.100.000,00	5	5.200.000,00	5	5.300.000,00
3.27 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN				15077923054		19.710.419.575,63		18.848.335.046,24		18.935.786.769,48		19.015.078.369,07		19.054.723.795,82
3.27.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				10231555002		18.202.680.311,63		16.683.335.046,24		16.737.786.769,48		16.784.078.369,07		16.790.723.795,82
Meningkatnya efektivitas, transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah	Persentase Realisasi Anggaran (%)	88	90,01	18.202.680.311,63	90,01	18.202.680.311,63	90,02	16.683.335.046,24	90,03	16.737.786.769,48	90,04	16.784.078.369,07	90,05	16.790.723.795,82
	Persentase Indikator Program yang tercapai (%)	90	100		100		100		100		100		100	
	Indeks Profesional ASN Perangkat Daerah (Angka)	80	80,2		80,2		80,3		80,4		80,5		80,6	
3.27.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				3127200		6.000.000,00		6.000.000,00		6.600.000,00		7.200.000,00		7.800.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya penyusunan dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja perangkat daerah yang disusun tepat waktu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	3127200	2	6.000.000,00	2	6.000.000,00	2	6.600.000,00	2	7.200.000,00	2	7.800.000,00
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2		2		2		2		2		2	
3.27.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				500000		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2	2	500000	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00
3.27.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				500000		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	500000	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.27.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				411200		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA- SKPD (Dokumen)	1	1	411200	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.27.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				670500		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	670500	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00
3.27.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD				670500		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA- SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA- SKPD (Dokumen)	1	1	670500	1	1.000.000,00	1	1.000.000,00	1	1.100.000,00	1	1.200.000,00	1	1.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				375000		1.000.000,00		1.000.000,00		1.100.000,00		1.200.000,00		1.300.000,00
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2	2	375000	2	1.000.000,00	2	1.000.000,00	2	1.100.000,00	2	1.200.000,00	2	1.300.000,00
3.27.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7636004820		13.860.813.789,6 3		12.384.371.507,0 0		12.404.523.230,3 5		12.397.414.829,94		12.351.760.256,6 9
Tersedianya penyusunan administrasi keuangan yang dipenuhi tepat waktu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	7636004820	0	13.860.813.789,6 3	1	12.384.371.507,0 0	1	12.404.523.230,3 5	1	12.397.414.829,94	1	12.351.760.256,6 9
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	109		109		70		75		80		90	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				7433259120		13.623.103.789,6 3		12.000.000.000,0 0		12.019.851.723,3 5		12.012.443.322,94		11.966.488.795,8 2
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	48	109	7433259120	109	13.623.103.789,6 3	70	12.000.000.000,0 0	75	12.019.851.723,3 5	80	12.012.443.322,94	90	11.966.488.795,8 2
3.27.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				202465000		237.710.000,00		344.371.507,00		344.471.507,00		344.571.507,00		344.671.460,87
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	202465000	1	237.710.000,00	1	344.371.507,00	1	344.471.507,00	1	344.571.507,00	1	344.671.460,87
3.27.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				280700		0,00		20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	1	0	280700	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00
3.27.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				0		0,00		20.000.000,00		20.100.000,00		20.200.000,00		20.300.000,00
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Se mesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulana n/Semesteran SKPD (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	20.100.000,00	1	20.200.000,00	1	20.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				0		1.736.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00
Jumlah Laporan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0	1	1.736.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.100.000,00
3.27.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				0		1.736.000,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.100.000,00
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	1	1	0	1	1.736.000,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.100.000,00
3.27.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				70000000		39.637.600,00		245.000.000,00		246.000.000,00		247.000.000,00		248.000.000,00
Terlaksananya penyelesaian dokumen administrasi kepegawaian tepat waktu	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	70000000	0	39.637.600,00	5	245.000.000,00	5	246.000.000,00	5	247.000.000,00	5	248.000.000,00
	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	0		0		70		75		80		90	
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan (Orang)	1	0		0		70		75		80		90	
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	5		5		10		10		10		10	
	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0		0		4		4		4		4	
3.27.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				70000000		29.637.600,00		70.000.000,00		70.500.000,00		71.000.000,00		71.500.000,00
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	1	1	70000000	1	29.637.600,00	1	70.000.000,00	1	70.500.000,00	1	71.000.000,00	1	71.500.000,00
3.27.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				0		0,00		15.000.000,00		15.100.000,00		15.200.000,00		15.300.000,00
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	5	15.000.000,00	5	15.100.000,00	5	15.200.000,00	5	15.300.000,00
3.27.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian				0		0,00		10.000.000,00		10.100.000,00		10.200.000,00		10.300.000,00
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	4	10.000.000,00	4	10.100.000,00	4	10.200.000,00	4	10.300.000,00
3.27.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				0		10.000.000,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	10	5	0	5	10.000.000,00	10	50.000.000,00	10	50.100.000,00	10	50.200.000,00	10	50.300.000,00
3.27.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	0	0	0	0,00	70	50.000.000,00	75	50.100.000,00	80	50.200.000,00	90	50.300.000,00
3.27.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				0		0,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	1	0	0	0	0,00	70	50.000.000,00	75	50.100.000,00	80	50.200.000,00	90	50.300.000,00
3.27.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				326448500		607.911.640,00		697.978.654,24		702.278.654,13		706.578.654,13		710.378.654,13
Terpenuhinya Kebutuhan Dasar Operasional Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	326448500	1	607.911.640,00	1	697.978.654,24	1	702.278.654,13	1	706.578.654,13	1	710.378.654,13
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				2205100		13.274.400,00		16.000.000,00		16.200.000,00		16.400.000,00		16.600.000,00
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	2205100	1	13.274.400,00	1	16.000.000,00	1	16.200.000,00	1	16.400.000,00	1	16.600.000,00
3.27.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				174713600		283.068.540,00		300.478.654,24		301.478.654,13		302.478.654,13		303.478.654,13
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	174713600	1	283.068.540,00	1	300.478.654,24	1	301.478.654,13	1	302.478.654,13	1	303.478.654,13
3.27.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				0		0,00		2.000.000,00		2.500.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.500.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00
3.27.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				56363000		97.338.700,00		150.000.000,00		151.000.000,00		152.000.000,00		153.000.000,00
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	56363000	1	97.338.700,00	1	150.000.000,00	1	151.000.000,00	1	152.000.000,00	1	153.000.000,00
3.27.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan				6980600		10.585.000,00		15.500.000,00		16.500.000,00		17.500.000,00		18.500.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	6980600	1	10.585.000,00	1	15.500.000,00	1	16.500.000,00	1	17.500.000,00	1	18.500.000,00
3.27.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				0		0,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.400.000,00		2.500.000,00
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00
3.27.01.2.06.0007 - Penyediaan Bahan/Material				0		0,00		2.000.000,00		2.200.000,00		2.400.000,00		2.500.000,00
Tersedianya Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan (Paket)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.200.000,00	1	2.400.000,00	1	2.500.000,00
3.27.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				86186200		203.645.000,00		210.000.000,00		210.200.000,00		210.400.000,00		210.600.000,00
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	1	1	86186200	1	203.645.000,00	1	210.000.000,00	1	210.200.000,00	1	210.400.000,00	1	210.600.000,00
3.27.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				118964300		47.843.200,00		160.000.000,00		185.000.000,00		210.000.000,00		252.500.000,00
Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	0	118964300	0	47.843.200,00	1	160.000.000,00	1	185.000.000,00	1	210.000.000,00	1	252.500.000,00
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		8		8		8		8	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		2		2		2		2	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	15		15		10		10		10		10	
	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0		0		1		1		1		2	
3.27.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0		0,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		100.000.000,00
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	4	0	0	0	0,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	100.000.000,00
3.27.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				118964300		47.843.200,00		100.000.000,00		110.000.000,00		120.000.000,00		130.000.000,00
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	1	15	118964300	15	47.843.200,00	10	100.000.000,00	10	110.000.000,00	10	120.000.000,00	10	130.000.000,00
3.27.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Tersedianya Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	2.000.000,00	5	3.000.000,00	5	4.000.000,00	5	4.500.000,00
3.27.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Tersedianya Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	2	4.500.000,00
3.27.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	4.000.000,00	2	4.500.000,00
3.27.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Tersedianya Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	0	0	0	0,00	8	2.000.000,00	8	3.000.000,00	8	4.000.000,00	8	4.500.000,00
3.27.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1924997382		3.358.707.382,00		2.913.984.885,00		2.915.284.885,00		2.916.684.885,00		2.917.584.885,00
Tersedianya laporan jasa penunjang urusan pemerintahan daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	1924997382	1	3.358.707.382,00	1	2.913.984.885,00	1	2.915.284.885,00	1	2.916.684.885,00	1	2.917.584.885,00
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0		0		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	
3.27.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				0		0,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		4.500.000,00
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	4.500.000,00
3.27.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				164725950		411.335.950,00		411.984.885,00		412.184.885,00		412.384.885,00		412.584.885,00
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	164725950	1	411.335.950,00	1	411.984.885,00	1	412.184.885,00	1	412.384.885,00	1	412.584.885,00
3.27.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.760.271.432		2.947.371.432,00		2.500.000.000,00		2.500.100.000,00		2.500.300.000,00		2.500.500.000,00
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.760.271.432	1	2.947.371.432,00	1	2.500.000.000,00	1	2.500.100.000,00	1	2.500.300.000,00	1	2.500.500.000,00
3.27.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				152.012.800		280.030.700,00		274.000.000,00		275.600.000,00		296.200.000,00		299.600.000,00
Terlaksananya laporan pemeliharaan barang milik daerah	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	10	152.012.800	10	280.030.700,00	10	274.000.000,00	10	275.600.000,00	10	296.200.000,00	10	299.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5		5		5		5		5		5	
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	20		20		25		25		25		25	
	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		30		30		40		40	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1		1		1		1		1		1	
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	2		2		2		2		2		2	
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				39248400		70.434.200,00		35.000.000,00		35.100.000,00		39.000.000,00		40.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	39248400	1	70.434.200,00	1	35.000.000,00	1	35.100.000,00	1	39.000.000,00	1	40.000.000,00
3.27.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				90264400		150.731.500,00		150.000.000,00		150.100.000,00		154.000.000,00		154.500.000,00
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2	10	90264400	10	150.731.500,00	10	150.000.000,00	10	150.100.000,00	10	154.000.000,00	10	154.500.000,00
3.27.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0		0,00		5.000.000,00		5.200.000,00		5.400.000,00		5.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0,00	30	5.000.000,00	30	5.200.000,00	40	5.400.000,00	40	5.500.000,00
3.27.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				15000000		30.000.000,00		20.000.000,00		20.300.000,00		20.600.000,00		20.700.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	25	20	15000000	20	30.000.000,00	25	20.000.000,00	25	20.300.000,00	25	20.600.000,00	25	20.700.000,00
3.27.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya				0		0,00		2.000.000,00		2.300.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	2.000.000,00	5	2.300.000,00	5	2.600.000,00	5	2.700.000,00
3.27.01.2.09.0008 - Pemeliharaan Aset Tak Berwujud				0		0,00		2.000.000,00		2.300.000,00		2.600.000,00		2.700.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara (Unit)	1	0	0	0	0,00	1	2.000.000,00	1	2.300.000,00	1	2.600.000,00	1	2.700.000,00
3.27.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0		18.865.000,00		20.000.000,00		20.100.000,00		24.000.000,00		24.500.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	4	2	0	2	18.865.000,00	2	20.000.000,00	2	20.100.000,00	2	24.000.000,00	2	24.500.000,00
3.27.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				0		0,00		20.000.000,00		20.100.000,00		24.000.000,00		24.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	0	0	0,00	5	20.000.000,00	5	20.100.000,00	5	24.000.000,00	5	24.500.000,00
3.27.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				7500000		10.000.000,00		20.000.000,00		20.100.000,00		24.000.000,00		24.500.000,00
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5	5	7500000	5	10.000.000,00	5	20.000.000,00	5	20.100.000,00	5	24.000.000,00	5	24.500.000,00
3.27.02 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN				2832156400		597.129.800,00		460.000.000,00		491.000.000,00		522.000.000,00		553.000.000,00
Meningkatnya populasi ternak (ekor)	Jumlah populasi ternak sapi potong (Ekor)	286.602	295.265	2832156400	295.265	597.129.800,00	295.264	460.000.000,00	300.113	491.000.000,00	305.012	522.000.000,00	309.953	553.000.000,00
	Jumlah populasi ternak sapi perah (Ekor)	1.607	1.655		1.655		1.692		1.732		1.771		1.812	
	Jumlah populasi ternak kambing (Ekor)	58.943	60.724		60.724		62.169		63.631		65.198		66.771	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN / OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah populasi ternak domba (Ekor)	88.124	90.788		90.788		93.081		95.409		97.783		100.203	
	Jumlah populasi ternak ayam buras (Ekor)	2.262.130	2.330.503		2.330.503		2.392.365		2.456.255		2.521.423		2.587.810	
	Jumlah populasi ternak ayam petelur (Ekor)	1.291.040	1.330.062		1.330.062		1.361.099		1.392.374		1.423.900		1.455.673	
	Jumlah populasi ternak ayam ras pedaging (Ekor)	12.125.499	13.522.217		13.522.217		13.873.280		14.234.598		14.606.483		14.989.292	
	Jumlah populasi ternak itik (Ekor)	212.825	219.257		219.257		224.060		229.002		234.080		239.295	
3.27.02.2.01 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian				0		0,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00
Jumlah unit sarana peternakan yang diawasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	20.000.000,00	1	22.000.000,00	1	24.000.000,00	1	26.000.000,00
	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.02.2.01.0001 - Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terawasinya Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.02.2.01.0002 - Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terlaksananya Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.02 - Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota				0		0,00		30.000.000,00		33.000.000,00		36.000.000,00		39.000.000,00
Jumlah komoditas ternak prioritas yang dikembangkan di Kabupaten Jember	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	30.000.000,00	1	33.000.000,00	1	36.000.000,00	1	39.000.000,00
	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.02.2.02.0002 - Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Meningkatnya Kualitas SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pelaksanaan Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.02.0003 - Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Termanfaatkannya SDG Hewan/Tanaman	Jumlah Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.02.0005 - Penjaminan Kemurnian				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
dan Kelestarian SDG Hewan														
Terjaminnya kemurnian dan kelestarian SDG hewan	Jumlah SDG hewan yang dilakukan pelestarian dan pemurnian (laporan)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.03 - Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		20.000.000,00		22.000.000,00		24.000.000,00		26.000.000,00
Jumlah benih/bibit ternak (straw) yang layak edar dan jenis tanaman pakan yang dikembangkan di Kabupaten Jember	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	2	0	0	0	0,00	2	20.000.000,00	2	22.000.000,00	2	24.000.000,00	2	26.000.000,00
	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.02.2.03.0001 - Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terawasanya Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil (Laporan)	2	0	0	0	0,00	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00	2	13.000.000,00
3.27.02.2.03.0002 - Pengawasan Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terawasinya Peredaran Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak	Jumlah Pengawasan Bahan Pakan/Pakan, Benih/Bibit Hijauan Pakan Ternak yang Beredar (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.04 - Pengawasan Obat Hewan di Tingkat Pengecer				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Jumlah unit usaha obat hewan yang diawasi	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	4	0	0	0	0,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00
3.27.02.2.04.0001 - Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Peredaran Obat Hewan				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terperiksanya Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan	Jumlah Pemeriksaan Mutu, Khasiat dan Keamanan Obat Hewan yang Beredar (Laporan)	4	0	0	0	0,00	4	10.000.000,00	4	11.000.000,00	4	12.000.000,00	4	13.000.000,00
3.27.02.2.05 - Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam Daerah Kabupaten/Kota				2832156400		597.129.800,00		380.000.000,00		403.000.000,00		426.000.000,00		449.000.000,00
Jumlah pengawasan bibit ternak dan pakan ternak di Kabupaten Jember	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	2832156400	1	597.129.800,00	1	380.000.000,00	1	403.000.000,00	1	426.000.000,00	1	449.000.000,00
	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1	0		0		1		1		1		1	
	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	5	0		0		5		5		5		5	
	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	1	0		0		1		1		1		1	
3.27.02.2.05.0002 - Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terlaksananya Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak	Hasil Pengujian Mutu Benih dan Bibit Ternak (Dokumen)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.05.0004 - Penjaminan Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terjaminnya Peredaran HPT, Bahan Pakan/Pakan	Jumlah HPT, Bahan Pakan/Pakan yang Beredar (Ton)	5	0	0	0	0,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	13.000.000,00
3.27.02.2.05.0007 - Pengawasan Peredaran dan Sertifikasi Benih/Bibit Ternak				0		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		13.000.000,00
Terawasinya peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak	Jumlah pengawasan peredaran benih/bibit ternak yang beredar dan bersertifikat (Laporan)	1	0	0	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	13.000.000,00
3.27.02.2.05.0008 - Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak				1579736000		499.170.200,00		300.000.000,00		310.000.000,00		320.000.000,00		330.000.000,00
Terjaminnya peredaran benih/bibit ternak	Jumlah benih/bibit ternak yang beredar (Laporan)	1	1	1579736000	1	499.170.200,00	1	300.000.000,00	1	310.000.000,00	1	320.000.000,00	1	330.000.000,00
3.27.02.2.05.0009 - Pengendalian Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak				1252420400		97.959.600,00		50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00
Terkendalinya penyediaan benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak	Jumlah benih/bibit ternak dan hijauan pakan ternak yang tersedia (Laporan)	1	1	1252420400	1	97.959.600,00	1	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00
3.27.03 - PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN				638141612		519.839.164,00		780.000.000,00		781.200.000,00		782.400.000,00		783.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Jumlah RPH/Puskesmas dan klinik hewan/RS hewan yang dibangun/direnovasi (Unit)	13	13	638141612	13	519.839.164,00	13	780.000.000,00	13	781.200.000,00	13	782.400.000,00	13	783.600.000,00
	Jumlah puskesmas, klinik hewan dan rumah sakit hewan yang dibangun/direnovasi (Unit)	18	18		18		18		18		18		18	
3.27.03.2.02 - Pembangunan Prasarana Pertanian				638141612		519.839.164,00		780.000.000,00		781.200.000,00		782.400.000,00		783.600.000,00
Jumlah total sarana peternakan yang dibangun dan direhabilitasi dalam waktu 1 tahun	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	12	0	638141612	0	519.839.164,00	16	780.000.000,00	16	781.200.000,00	16	782.400.000,00	16	783.600.000,00
	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	12	12		12		12		12		12		12	
	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	12	16		16		16		16		16		16	
	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	12	14		14		14		14		14		14	
	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	12	16		16		16		16		16		16	



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	12	0		0		16		16		16		16	
3.27.03.2.02.0009 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya				0		0,00		10.000.000,00		10.200.000,00		10.400.000,00		10.600.000,00
Terbangun, Terehabilitasi dan Terpeliharanya Prasarana Pertanian Lainnya	Jumlah Prasarana Pertanian Lainnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara (Unit)	12	0	0	0	0,00	16	10.000.000,00	16	10.200.000,00	16	10.400.000,00	16	10.600.000,00
3.27.03.2.02.0011 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak				329666000		399.999.200,00		250.000.000,00		250.200.000,00		250.400.000,00		250.600.000,00
Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Pembibitan/Produksi Ternak	Jumlah Prasarana untuk UPTD Pembibitan/Produksi Ternak yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	12	14	329666000	14	399.999.200,00	14	250.000.000,00	14	250.200.000,00	14	250.400.000,00	14	250.600.000,00
3.27.03.2.02.0012 - Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		36.196.464,00		70.000.000,00		70.200.000,00		70.400.000,00		70.600.000,00
Terbangun, terehabilitasi dan terpeliharanya Sarana Prasarana Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara (Unit)	12	16	0	16	36.196.464,00	16	70.000.000,00	16	70.200.000,00	16	70.400.000,00	16	70.600.000,00
3.27.03.2.02.0013 - Pembangunan dan Rehabilitasi prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan				0		0,00		50.000.000,00		50.200.000,00		50.400.000,00		50.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terbangunnya dan Terehabilitasinya sarana dan prasarana UPTD Balai Inseminasi Buatan	Jumlah Prasarana untuk UPTD BIB yang dibangun dan direhabilitasi (Unit)	12	0	0	0	0,00	16	50.000.000,00	16	50.200.000,00	16	50.400.000,00	16	50.600.000,00
3.27.03.2.02.0014 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas				0		40.004.000,00		200.000.000,00		200.200.000,00		200.400.000,00		200.600.000,00
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya Puskesmas	Jumlah Puskesmas yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	12	16	0	16	40.004.000,00	16	200.000.000,00	16	200.200.000,00	16	200.400.000,00	16	200.600.000,00
3.27.03.2.02.0015 - Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Rumah Potong Hewan				308475612		43.639.500,00		200.000.000,00		200.200.000,00		200.400.000,00		200.600.000,00
Terbangun, terehabilitasi, terpelihara dan beroperasinya rumah potong hewan	Jumlah rumah potong hewan yang dibangun, direhabilitasi dan dipelihara serta beroperasi (Unit)	12	12	308475612	12	43.639.500,00	12	200.000.000,00	12	200.200.000,00	12	200.400.000,00	12	200.600.000,00
3.27.04 - PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER				1376070040		390.770.300,00		925.000.000,00		925.800.000,00		926.600.000,00		927.400.000,00
Menurunnya Angka Kematian Ternak	Persentase Angka Kematian Ternak (%)	0,8	0,8	1376070040	0,8	390.770.300,00	0,8	925.000.000,00	0,8	925.800.000,00	0,8	926.600.000,00	0,8	927.400.000,00
3.27.04.2.01 - Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota				861983600		240.155.000,00		325.000.000,00		325.200.000,00		325.400.000,00		325.600.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Prosentase Penurunan Angka Kejadian Penyakit Menular Ternak dan zoonosis dalam waktu 1 tahun	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	15	20	861983600	20	240.155.000,00	22	325.000.000,00	24	325.200.000,00	25	325.400.000,00	26	325.600.000,00
	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15	20		20		22		24		25		26	
3.27.04.2.01.0005 - Pelaksanaan Surveilans Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				825859600		200.154.900,00		175.000.000,00		175.100.000,00		175.200.000,00		175.300.000,00
Terlaksananya surveilans penyakit hewan dan zoonosis pada Hewan	Jumlah wilayah yang dilakukan surveilans dan zoonosis pada Hewan (Wilayah)	15	20	825859600	20	200.154.900,00	22	175.000.000,00	24	175.100.000,00	25	175.200.000,00	26	175.300.000,00
3.27.04.2.01.0006 - Pelaksanaan Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan				36.124.00		40.000.100,00		150.000.000,00		150.100.000,00		150.200.000,00		150.300.000,00
Terlaksananya Penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan	Jumlah kejadian penyakit yang ditindaklanjuti dengan penyidikan Penyakit Hewan dan Zoonosis pada Hewan (Kasus)	15	20	36.124.00	20	40.000.100,00	22	150.000.000,00	24	150.100.000,00	25	150.200.000,00	26	150.300.000,00
3.27.04.2.02 - Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota				0		0,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Jumlah laporan pengawasan Pemasukan & Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	4	0	0	0	0,00	4	50.000.000,00	4	50.100.000,00	4	50.200.000,00	4	50.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
3.27.04.2.02.0004 - Pengawasan atas Penerapan Persyaratan Teknis untuk Pemasukan dan/atau Pengeluaran Hewan, Produk Hewan dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0		0,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Terawasinya penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM	Jumlah pengawasan penerapan persyaratan teknis untuk pemasukan dan/atau pengeluaran HPM (laporan)	4	0	0	0	0,00	4	50.000.000,00	4	50.100.000,00	4	50.200.000,00	4	50.300.000,00
3.27.04.2.03 - Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota				511086440		113.630.300,00		400.000.000,00		400.200.000,00		400.400.000,00		400.600.000,00
Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	8	12	64161400	12	38.608.500,00	12	100.000.000,00	12	100.100.000,00	12	100.200.000,00	12	100.300.000,00
3.27.04.2.03.0001 - Penyediaan Pelayanan Jasa Laboratorium				38.608.500		38.608.500,00		100.000.000,00		100.100.000,00		100.200.000,00		100.300.000,00
Tersedianya Pelayanan Jasa Laboratorium	Jumlah Pelayanan Jasa Laboratorium (Laporan)	8	12	38.608.500	12	38.608.500,00	12	100.000.000,00	12	100.100.000,00	12	100.200.000,00	12	100.300.000,00
Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	9	12	75.021.800	12	75.021.800,00	12	300.000.000,00	12	300.100.000,00	12	300.200.000,00	12	300.300.000,00
3.27.04.2.03.0002 - Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner				446925040		75.021.800,00		300.000.000,00		300.100.000,00		300.200.000,00		300.300.000,00
Tersedianya Pelayanan Jasa Medik Veteriner	Jumlah Pelayanan Jasa Medik Veteriner (Laporan)	9	12	446925040	12	75.021.800,00	12	300.000.000,00	12	300.100.000,00	12	300.200.000,00	12	300.300.000,00
3.27.04.2.04 - Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner				3000000		36.985.000,00		150.000.000,00		150.300.000,00		150.600.000,00		150.900.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	8	8	3000000	8	11.980.000,00	8	50.000.000,00	8	50.100.000,00	8	50.200.000,00	8	50.300.000,00
3.27.04.2.04.0002 - Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan				3000000		11.980.000,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Terawasinya Peredaran Hewan dan Produk Hewan	Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan (Laporan)	8	8	3000000	8	11.980.000,00	8	50.000.000,00	8	50.100.000,00	8	50.200.000,00	8	50.300.000,00
Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	8	8	0	0	0,00	8	50.000.000,00	8	50.100.000,00	8	50.200.000,00	8	50.300.000,00
3.27.04.2.04.0004 - Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner				0		0,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00
Terlaksananya Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Pengujian Laboratorium Kesehatan Masyarakat Veteriner (Dokumen)	8	8	0	0	0,00	8	50.000.000,00	8	50.100.000,00	8	50.200.000,00	8	50.300.000,00
Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	8	0	0	8	25.005.000,00	10	50.000.000,00	12	50.100.000,00	15	50.200.000,00	18	50.300.000,00
3.27.04.2.04.0006 - Pengelolaan Penerbitan Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH Hewan, Produk Hewan, dan Media Pembawa Penyakit Hewan Lainnya (HPM)				0		25.005.000,00		50.000.000,00		50.100.000,00		50.200.000,00		50.300.000,00



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN											
			2025		2026		2027		2028		2029		2030	
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)
Terkelolanya Penerbitan Rekomendasi Pemasukan, Rekomendasi Pengeluaran, Sertifikat Veteriner dan SKKH/SKPH untuk HPM	Jumlah Rekomendasi Pemasukan dan Pengeluaran, Sertifikat Veteriner, dan SKKH/SKPH HPM (Dokumen)	8	0	0	8	25.005.000,00	10	50.000.000,00	12	50.100.000,00	15	50.200.000,00	18	50.300.000,00



4.3 Daftar Sub Kegiatan dalam mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

Dalam rangka mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah Kabupaten Jember, Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan melaksanakan berbagai sub kegiatan strategis yang diarahkan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, meningkatkan produksi dan produktivitas sektor peternakan dan perikanan. Berikut merupakan sub kegiatan prioritas yang mendukung program prioritas Pembangunan Kabupaten Jember

Tabel 4.3 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
1	Pendirian PUSKESWAN (Pusat Kesehatan Hewan) dan	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pembangunan Prasarana Pertanian	Pembangunan atau rehabilitasi bangunan untuk dijadikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) baru di Wilayah Tanggul
2	Revitalisasi Pasar Hewan	Meningkatnya distribusi dan kualitas prasarana pertanian	Pembangunan, Rehabilitasi, Pemeliharaan dan operasionalisasi Puskesmas	Revonasi bangunan RPH Mayang untuk dijadikan Pusat Kesehatan Hewan (Puskesmas) baru di Wilayah Mayang
3	Jaminan Ketersediaan BBM	Meningkatnya akses nelayan terhadap BBM bersubsidi yang terjangkau dan berkelanjutan untuk mendukung operasional penangkapan ikan	Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan	Jaminan ketersediaan BBM untuk nelayan dapat menjaga keberlanjutan usaha penangkapan, serta meningkatkan frekuensi melaut
4	Bantuan Peralatan Kerja	Meningkatnya produktivitas dan efisiensi	Penyediaan Sarana Usaha	Bantuan Peralatan Kerja mampu



NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/ SUBKEGIATAN	KETERANGAN
		usaha nelayan melalui pemanfaatan sarana dan prasarana perikanan yang lebih memadai.	Perikanan Tangkap	meningkatkan hasil tangkapan, memperbaiki mutu ikan yang dihasilkan, serta mengurangi resiko kerusakan peralatan yang dapat menghambat produktivitas
5	Asuransi Jiwa Untuk Nelayan	Meningkatnya rasa aman dan perlindungan sosial nelayan dalam menjalankan usaha penangkapan ikan.	Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil	Memberikan perlindungan bagi nelayan dan keluarganya sehingga dapat mengurangi kerentanan sosial-ekonomi, serta meningkatkan motivasi kerja nelayan

4.4 Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) merupakan alat ukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan daerah. IKU menggambarkan capaian kinerja strategis yang memiliki dampak langsung terhadap masyarakat dan berkontribusi terhadap visi dan misi kepala daerah, sedangkan IKK digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan secara operasional di tingkat perangkat daerah.

Penetapan IKU dan IKK dilakukan dengan memperhatikan keterkaitan antara tujuan, sasaran, dan indikator kinerja daerah sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMD Kabupaten Jember, serta memperhatikan Renstra Dinas Provinsi dan Kementerian terkait.

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan meliputi antara lain:



Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan

NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,6	92,7	92,8	92,9	93	93,1	
2	Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan (Prevalence of Undernourishment)	%	9,62	9,23	8,85	8,47	8,08	7,7	
3	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	%	11,2	12,4	13,7	14,5	16,1	17,4	
4	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Budidaya	%	2,1	2,12	2,14	2,16	2,18	2,2	
5	Persentase Peningkatan Produksi Perikanan Tangkap	%	1,9	1,92	1,94	1,96	1,98	2	
6	Persentase Peningkatan Produksi Olahan Perikanan	%	1,52	1,54	1,56	1,58	1,6	1,62	
7	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	81	82	83	84	85	86	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan meliputi antara lain:

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan



NO	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN						KET
			2025	2026	2027	2028	2029	2030	
1	Skor Pola Pangan Harapan	Nilai	92,6	92,7	92,8	92,9	93	93,1	
2	Persentase peningkatan produksi komoditas peternakan	%	11,2	12,4	13,7	14,5	16,1	17,4	
3	Persentase peningkatan produksi daging sapi	%	1,5	1,7	1,9	2,0	2,2	2,4	
4	Persentase peningkatan produksi daging babi	%	1,2	1,5	1,7	1,8	2,1	2,3	
5	Persentase peningkatan produksi daging kambing	%	1,7	1,8	1,9	1,9	2,0	2,1	
6	Persentase peningkatan produksi daging domba	%	1,6	1,7	1,8	1,9	2,3	2,5	
7	- Persentase peningkatan produksi daging unggas	%	1,7	1,9	2,0	2,1	2,3	2,5	
8	- Persentase peningkatan produksi susu sapi	%	1,3	1,5	1,8	2,0	2,2	2,4	
9	- Persentase peningkatan produksi telur	%	2,2	2,4	2,6	2,8	3,0	3,2	
10	Produksi Perikanan Budidaya	%	1,1	1,15	1,2	1,25	1,3	1,35	
11	Produksi Perikanan Tangkap	%	1,4	1,45	1,5	1,55	1,6	1,65	



BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2025 hingga 2029. Renstra Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan, Peternakan, dan Perikanan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan Tahun 2025-2029 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan Peternakan dan Perikanan sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Dinas Ketahanan Pangan,
Peternakan Kabupaten Jember

Kepala Dinas Perikanan
Kabupaten Jember

Ir. Widodo Julianto
Pembina Utama Muda / IV-c
NIP. 19660721 199203 1 007



dln. Sugiyarto, S.KH, M.Si
Pembina Tingkat I / IV-b
NIP. 19801027 200604 1 014